

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Gorontalo**

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2024



gorontalo.bpk.go.id



[bpkrigorontalo](https://www.instagram.com/bpkrigorontalo)



gorontalo-ppid.bpk.go.id



LAPORAN KINERJA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2024

INDEPENDENSI – INTEGRITAS - PROFESIONALISME

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,



Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo disusun dalam rangka penyusunan LAK BPK guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi BPK periode 2020 - 2024. Selain itu laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan *good and clean government*

serta sebagai bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun berikutnya.

Perhatian pemilik kepentingan, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah, maupun masyarakat umum terhadap kinerja pemeriksaan BPK juga semakin meningkat. Kondisi ini kian menguatkan semangat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian visi BPK “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.

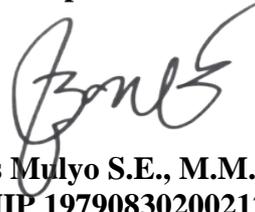
Indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja yang ditandatangani Auditor Utama Keuangan Negara VI dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo merupakan pengejawantahan atas sasaran strategis BPK guna mewujudkan visi dan misi BPK.

Akhirnya dengan semangat integritas, independensi, dan profesionalisme untuk memberikan kontribusi terbaik, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya membangun kultur organisasi perwakilan yang lebih baik agar kepercayaan pemilik kepentingan terhadap kinerja BPK semakin meningkat. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan Auditorat Utama Keuangan Negara VI.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Gorontalo, 31 Januari 2025

Kepala Perwakilan



Bombit Agus Mulyo S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
NIP 197908302002121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I. PENDAHULUAN.....	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	7
C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	10
D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	12
1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	12
2. SUMBER DAYA KEUANGAN	13
E. ISU STRATEGIS	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	17
A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	17
B. TARGET KINERJA	20
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024.....	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	28
A. HASIL EVALUASI AKIP.....	28
B. CAPAIAN KINERJA	30
1. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024	30
2. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO PADA LIMA TAHUN TERAKHIR.....	31
3. PERBANDINGAN CAPAIAN IKU TAHUN 2024 DENGAN TARGET KERJA LIMA TAHUN	32
4. PENJELASAN ATAS CAPAIAN IKU TAHUN 2024.....	33
C. ANALISIS EFISIENSI.....	58
D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA	60
E. REALISASI ANGGARAN	61
F. INOVASI.....	63
G. PENGHARGAAN.....	67

BAB IV PENUTUP.....	69
A. PENCAPAIAN SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN GORONTALO SECARA UMUM 69	
B. SEBAB-SEBAB UMUM PERUBAHAN CAPAIAN SKOR.....	69
C. KENDALA/HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN IKU TAHUN 2024	73
D. STRATEGI DAN RENCANA AKSI DALAM PEMENUHAN TARGET TAHUN 2025..	74
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

TABEL 1 JUMLAH PEGAWAI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	12
TABEL 2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024	21
TABEL 3 CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024.....	30
TABEL 4 PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN PELAPORAN DENGAN CAPAIAN EMPAT TAHUN TERAKHIR	32
TABEL 5 PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2023 DENGAN TARGET KINERJA LIMA TAHUN	32
TABEL 6 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 1 TAHUN 2020-2024	34
TABEL 7 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 2 TAHUN 2020-2024	35
TABEL 8 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 3 TAHUN 2020-2024	37
TABEL 9 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 4 TAHUN 2020-2024	40
TABEL 10 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 5 TAHUN 2020-2024.....	41
TABEL 11 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 6 TAHUN 2020-2024.....	43
TABEL 12 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 7 TAHUN 2020-2024.....	44
TABEL 13 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 8 TAHUN 2020-2024.....	46
TABEL 14 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 9 TAHUN 2020-2024.....	48
TABEL 15 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 10 TAHUN 2020-2024.....	50
TABEL 16 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 11 TAHUN 2020-2024.....	53
TABEL 17 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 12 TAHUN 2020-2024.....	55
TABEL 18 PERKEMBANGAN CAPAIAN IKU 13 TAHUN 2020-2024.....	57
TABEL 19 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN, RINCIAN OUTPUT, DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024	62

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	10
GAMBAR 2 PETA STRATEGI AUDITORAT KEUANGAN NEGARA VI.....	20
GAMBAR 3 PETA STRATEGI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 2 Rencana Aksi Tahun 2024

Lampiran 3 Data Realisasi Anggaran Tahun 2024

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Bagian Keenam Pelaporan Kinerja Pasal 18 (1) yang menetapkan antara lain bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. BPK sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diantaranya mengatur bahwa Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja Tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan pada Bagian Kesembilan Belas Pasal 735 ayat (1) yang menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berada dibawah Auditorat Utama

Kuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI, dan Pasal 736 menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

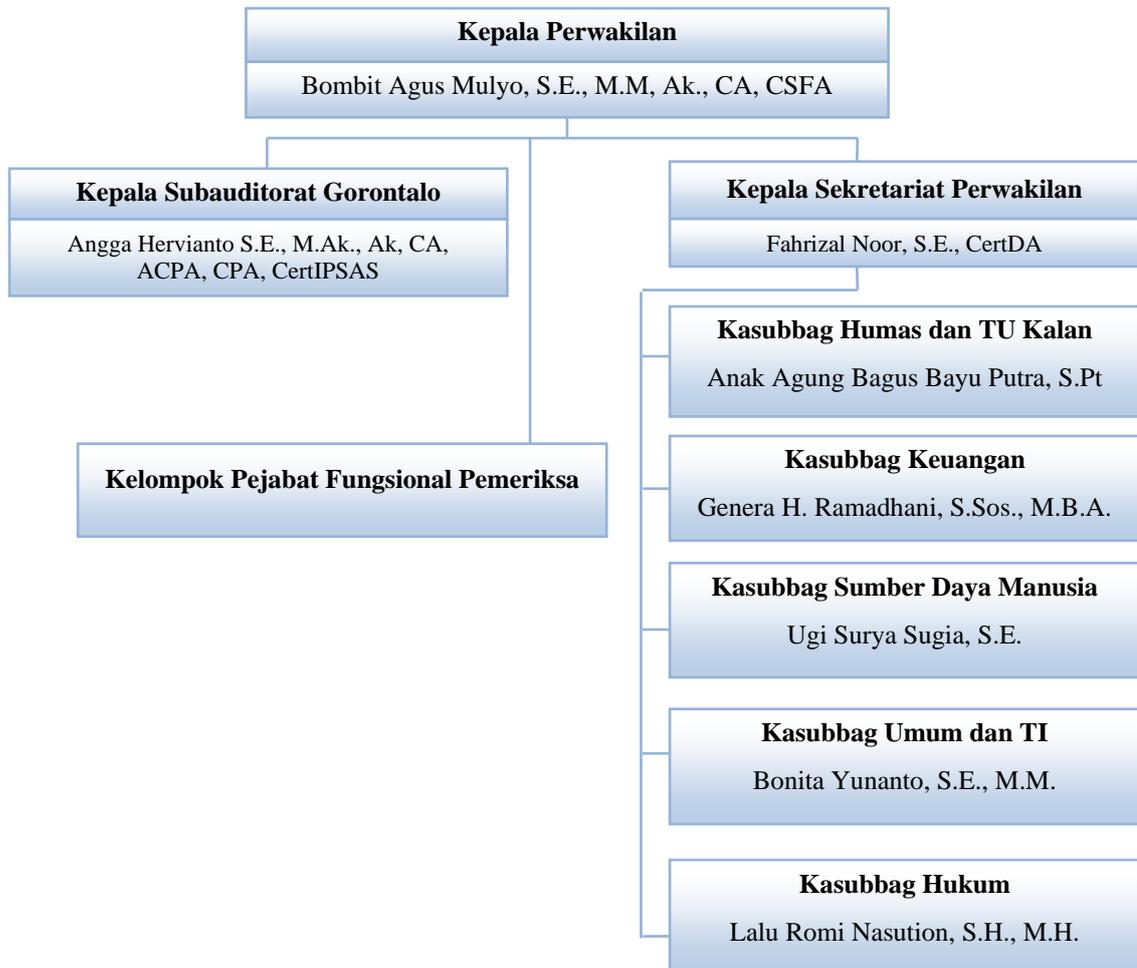
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736 di atas, sesuai Pasal 737 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kecuali Pemeriksaan Investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Pengkompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK

- Perwakilan Provinsi Gorontalo, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
 13. Penyiapan bahan perumusan bahan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
 15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
 16. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
 17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
 18. Penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan
 19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai delapan pejabat struktural yang terdiri atas Kepala Perwakilan, Kepala Subauditorat, Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian SDM, Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (TI), Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, dan Kepala Subbagian Hukum.

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah unsur pelaksana BPK. Tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terdiri atas:

1. Subauditorat Gorontalo

Subauditorat Gorontalo mempunyai tugas:

- a. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) Merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) Mengevaluasi hasil kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

2. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;

- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- f. Penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- g. Penyiapan bahan penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Gorontalo terdiri atas Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan TI, dan Subbagian Hukum.

3. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN VI dan Auditorat Utama Investigasi.

D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2024 sebanyak 106 pegawai dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1 Jumlah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Perwakilan
2.	Administrator	2	1 Kepala Sekretariat Perwakilan 1 Kepala Subauditorat
3.	Pengawas	5	Kepala Subbagian (Umum dan TI, Humas dan TU, SDM, Keuangan, dan Hukum)
4.	Fungsional Pemeriksa		
	a. Pemeriksa Madya	2	
	b. Pemeriksa Muda	6	
	c. Pemeriksa Pertama	48	
6.	Fungsional Lainnya		
	a. Pranata Komputer Terampil	1	
	b. Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1	

	c. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	
	d. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	
7.	Jabatan Pelaksana	15	
8.	Tenaga Tidak Tetap	23	13 Satuan Pengamanan (Satpam), 1 tenaga administrasi, 4 pengemudi, 2 teknisi, 1 resepsionis dan 2 tenaga kesehatan (dokter dan perawat).
Total		106	

Ditinjau dari berbagai aspek, seluruh pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a) Berdasarkan Jenis Kelamin
 - 1) Laki-Laki sebanyak 73 pegawai; dan
 - 2) Perempuan sebanyak 33 pegawai
- b) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
 - 1) Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 21 pegawai;
 - 2) Diploma III sebanyak 11 pegawai;
 - 3) Strata 1 (S1) sebanyak 65 pegawai; dan
 - 4) Strata 2 (S2) sebanyak 9 pegawai;
- c) Berdasarkan Pangkat/Golongan
 - 1) Pengatur (II/c) sebanyak 7 pegawai;
 - 2) Pengatur Tk. I (II/d) sebanyak 4 pegawai;
 - 3) Penata Muda (III/a) sebanyak 46 pegawai;
 - 4) Penata Muda Tk. I (III/b) sebanyak 9 pegawai;
 - 5) Penata (III/c) sebanyak 2 pegawai;
 - 6) Penata Tk. I (III/d) sebanyak 9 pegawai;
 - 7) Pembina (IV/a) sebanyak 4 pegawai;
 - 8) Pembina Tk. I (IV/b) sebanyak 1 pegawai; dan
 - 9) Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 pegawai.
- d) Berdasarkan Masa Kerja
 - 1) Masa kerja 4 Tahun ke atas sebanyak 37 pegawai;
 - 2) Masa kerja 2 s.d. 4 Tahun sebanyak 51 pegawai; dan
 - 3) Masa kerja 2 Tahun ke bawah sebanyak 18 pegawai.

2. SUMBER DAYA KEUANGAN

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada TA 2024 memperoleh anggaran sebesar Rp18.078.290.000. Selama TA 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

mengalami penyesuaian anggaran sebanyak 14 kali, dari nilai anggaran awal sebesar Rp18.250.010.000 kemudian dirasionalisasi menjadi sebesar Rp18.078.290.000. Anggaran tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran TA 2023 yakni sebesar Rp16.737.520.000,00.

Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah merealisasikan anggaran sebesar Rp17.900.531.539 atau 99,02% dari anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Program Pemeriksaan Keuangan Negara. Meskipun terdapat rasionalisasi, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mengupayakan efisiensi pemanfaatan anggaran sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dan tidak ada *output* serta *outcomes* yang berkurang.

E. ISU STRATEGIS

Selaras dengan penyusunan Renstra BPK 2020 s.d. 2024, dalam penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020 s.d. 2024 juga diperhatikan isu strategis yang sedang terjadi di internal organisasi sebagai gambaran kondisi dan capaian pada saat ini yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi serta mendorong keberhasilan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020 s.d. 2024.

Beberapa isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada saat penyusunan Renstra 2020 s.d. 2024 dan perkembangannya s.d. periode 2024, yaitu sebagai berikut:

- a. Realisasi penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang melebihi targetnya telah diikuti dengan optimalisasi penggunaan aplikasi SMP dan SiPTL untuk efisiensi pelaksanaan dan keakurasian *database* serta laporan hasil pemantauan.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis pada Renstra 2020 s.d. 2024 ditetapkan indikator yang salah satunya adalah Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Berdasarkan data IHPS Semester I 2024, persentase penyelesaian TLRHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berada pada angka 78,13% dari target 75,00%.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan analisis untuk mengetahui penyebab masih rendahnya persentase tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan diketahui antara lain adalah:

- 1) Komitmen

Komitmen dalam penyelesaian rekomendasi temuan belum sama di seluruh Organisasi Perangkat Daerah/Entitas, antara lain:

- a. Majelis TP/TGR tidak berjalan efektif;
 - b. Penyelesaian TLRHP belum menjadi indikator pengukuran kinerja satker.
- 2) Pemahaman Terbatas
- a. Substansi temuan dan rekomendasi belum dipahami dengan baik oleh entitas sehingga menyebabkan kesalahpahaman interpretasi rekomendasi.
 - b. Kurangnya pemahaman terkait kewajiban melaksanakan TLRHP. Pemeriksaan dianggap berakhir saat LHP diserahkan padahal seharusnya setelah rekomendasi selesai ditindaklanjuti.
- 3) Perubahan Regulasi
- Regulasi yang menjadi kriteria pada temuan sudah dicabut/tidak berlaku.
- 4) Subjek PTL Tidak Ada
- Subjek PTL meninggal/sakit, perusahaan bubar, bangkrut, dll.

Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan kegiatan percepatan pemantauan tindak lanjut untuk mendorong Pemda agar segera menyelesaikan tindak lanjutnya sehingga target 75,00% terus tercapai. Strategi tersebut meliputi:

- 1) penyampaian tindak lanjut langsung melalui SiPTL dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiPTL dengan terus mengkomunikasikan dengan Inspektorat Daerah masing-masing entitas;
- 2) Membuka kesempatan pemutakhiran tindak lanjut setiap bulan dan menjalin komunikasi intensif setiap triwulan untuk menampung kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut (konsultasi dan bimbingan percepatan TL);
- 3) Inventarisasi tindak lanjut yang belum terselesaikan berdasarkan sebaran OPD beserta penyebabnya;
- 4) Berkoordinasi dengan Inspektorat selaku koordinator penyelesaian tindak lanjut agar lebih intens dalam melakukan monitoring TLRHP pada setiap OPD;
- 5) Menyarankan kepada entitas agar menjadikan penyelesaian tindak lanjut sebagai indikator penilaian kinerja OPD;
- 6) Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki prosentase tertinggi dalam Penyelesaian Tindak Lanjut dan yang memiliki progres tertinggi Penyelesaian Tindak Lanjut dalam satu tahun; dan

- 7) Monitoring atas penyelesaian tindak lanjut dua minggu setelah LHP diserahkan.
- b. Hasil evaluasi Direktorat EPP masih mengungkap adanya kesalahan dalam penulisan LHP. Pada Tahun 2024, melalui Nota Dinas Kepala Direktorat EPP Nomor 379/ND/XII.2/09/2024, masih ditemukan ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan dalam penyusunan LHP walaupun telah diupayakan pemenuhan *Quality Control (QC)* pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance (QA)* yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Disamping itu, telah diupayakan lebih ketatnya QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I dan II.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Lampiran LXXVIII Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memuat visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis.

1. Visi

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Visi ini berarti bahwa sesuai dengan mandat yang tertuang dalam UUD 1945, BPK pada periode 2020-2024 akan aktif menjalankan kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

2. Misi

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan Misi 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi dan usulan bahan pendapat;
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian daerah; dan
- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya di Provinsi Gorontalo.

3. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

- a. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

b. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

c. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

5. Sasaran Strategis

Untuk periode 2020–2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan sasaran strategis sebagai berikut: “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi” Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, usulan bahan pendapat, dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga berkomitmen untuk

menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaannya. Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta daerah sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ingin berperan aktif meningkatkan penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara, pengelola BUMD, dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan daerah. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian daerah ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian daerah yang dipulihkan.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan rekomendasi dan usulan bahan pendapat atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta penyelesaian ganti kerugian daerah, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memastikan adanya tata kelola pemerintahan (*good government governance*) yang baik. Hal ini penting untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang sinergis dengan menjaga kolaborasi konstruktif antara institusi, lembaga negara, swasta dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi ditunjukkan dengan berjalannya reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*).

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9)

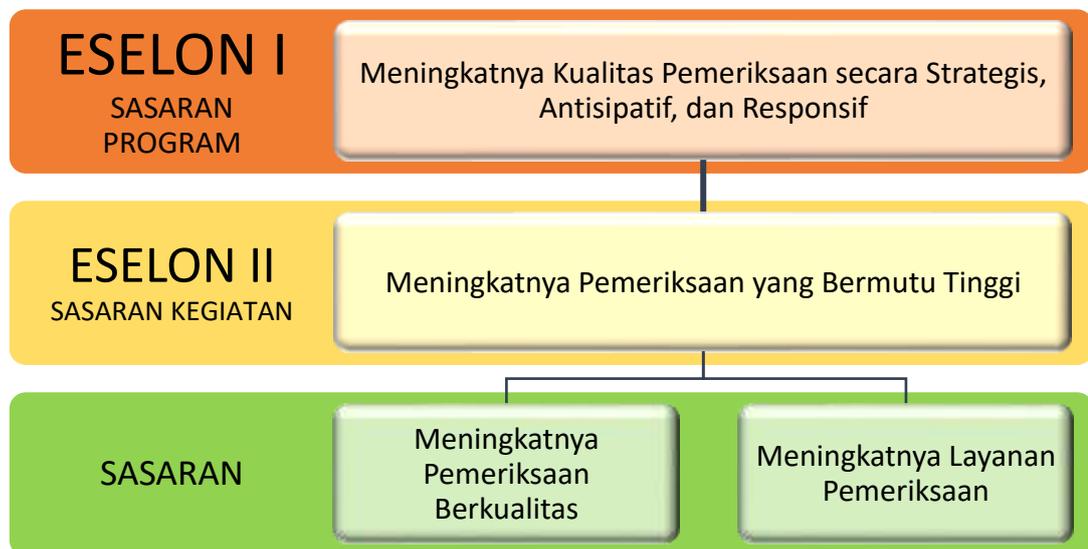
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

B. TARGET KINERJA

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

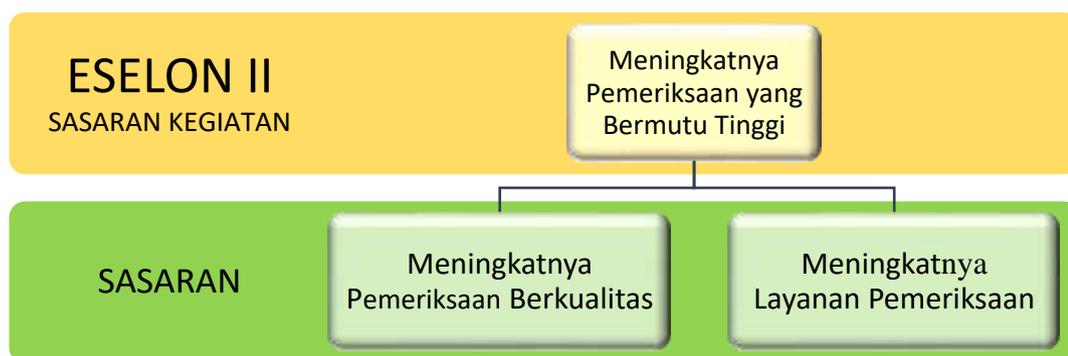
Auditor Utama Keuangan Negara VI sebagai kepanjangan BPK untuk wilayah Timur menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta strategi dan Indikator Kinerja yang akan dicapai Tahun 2024. Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja Tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap Tahunnya. Keterkaitan tugas dan fungsi AKN VI dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis AKN VI berikut ini.

Gambar 2 Peta Strategi Auditorat Keuangan Negara VI



BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selaku satuan kerja pelaksana BPK menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta strategi dan indikator kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang kemudian dijabarkan dalam sistem penganggaran (RKP/RKSP) BPK. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berikut.

Gambar 3 Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo



Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU Tahun 2024. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Tortama KN VI selaku Eselon I dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo selaku Eselon II di Jakarta pada Bulan Desember Tahun 2023. Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran, Indikator Kinerja, dan Target Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dimuat pada tabel berikut.

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp18.250.010.000,00	1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	Rp5.978.410.000,00	2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp12.271.600.000,00	3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)
		8.	Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)
		9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
		10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13.	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menargetkan pencapaian atas 13 IKU, yang terdiri atas:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP;
9. IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memanfaatkan anggaran yang diberikan sebesar Rp18.250.010.000,00 untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

2. RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

Rencana aksi pencapaian target kinerja memuat rincian kegiatan yang mendukung pencapaian tiap IKU setiap triwulan secara rinci dan lengkap yang dapat menggambarkan upaya BPK Perwakilan Provinsi dalam mencapai target indikator kinerja. Pada rencana aksi memuat angka target setiap Triwulanan dengan mempertimbangkan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo serta tetap memperhatikan pencapaian target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini tampak antara lain pada IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, rencana aksi yang dibuat adalah dengan meningkatkan *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) serta pada IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, rencana aksi yang dibuat adalah mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK dan

pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Rencana aksi secara rinci disajikan pada Lampiran 3.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

A. HASIL EVALUASI AKIP

Dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPK telah melaksanakan evaluasi AKIP. Pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2024 dilakukan secara *desk evaluation* dengan melakukan penelaahan Lembar Kerja Evaluasi hasil penilaian mandiri dan dokumen pendukung, wawancara pendalaman dengan admin dan manajer Indikator Kinerja Utama (IKU), serta menginformasikan hasil penilaian yang disepakati kepada kepala satuan kerja. Hasil evaluasi oleh Inspektorat Utama atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memperoleh nilai sebesar **91,40** dengan predikat **AA (Sangat Memuaskan)**, dengan hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

Capaian organisasi pada komponen perencanaan kinerja mendapatkan nilai 27,60 atau 92% dari bobot 30. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memenuhi kriteria pada komponen Perencanaan Kinerja secara optimal dengan upaya sebagai berikut.

- a. Secara rutin melakukan evaluasi atas indikator dan target kinerja;
- b. Telah menyusun perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, dengan indikator SMART, serta *cascading* sampai dengan level individu; dan
- c. Telah menggunakan aplikasi Proses RKA dalam penyusunan anggaran dan proses penelitian anggaran.

Pada tahap Perencanaan Kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo belum memiliki upaya inovatif serta layak menjadi percontohan di tingkat satuan kerja terkait perencanaan kinerja. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya untuk tetap mempertahankan atas apa yang telah tercapai pada komponen perencanaan kinerja dan memperbaiki apa yang menjadi catatan.

2. Pengukuran Kinerja

Capaian organisasi pada komponen pengukuran kinerja mendapatkan nilai 27,00 atau 90,00% dari bobot 30. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memenuhi kriteria pada komponen Pengukuran Kinerja secara optimal dengan upaya pemanfaatan portal kolaborasi untuk penyampaian data/dokumen dan penggunaan aplikasi PRISMA untuk pengukuran kinerja yang dimonitor secara triwulanan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga telah melakukan upaya inovatif yaitu “Optimalisasi Portal Satuan Kerja” yang layak menjadi percontohan dan diakui oleh Direktorat PSMK sebagai capaian Indikator Kinerja (IK) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan melalui Nota Dinas Nomor 53/ND/XII.1/1/2023 tanggal 26 Januari 2023.

Pada tahap Pengukuran Kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo belum memenuhi satu dari tiga sub komponen yang digunakan sebagai ukuran penilaian komponen pengukuran kinerja yaitu pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya untuk tetap mempertahankan atas apa yang telah tercapai pada komponen perencanaan kinerja dan memperbaiki apa yang menjadi catatan dengan berkoordinasi dengan Biro SDM terkait pemberian *reward and punishment*.

3. Pelaporan Kinerja

Capaian organisasi pada komponen pelaporan kinerja mendapatkan nilai 13,30 atau 88,67% dari bobot 15. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memenuhi kriteria pada komponen Pelaporan Kinerja secara optimal yaitu Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 telah menyajikan seluruh informasi yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memanfaatkan rewiu LAKIN untuk menyempurnakan perencanaan kinerja tahunan tahun berikutnya. Namun, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo belum ada upaya inovatif atau layak menjadi percontohan ditingkat satuan kerja terkait dengan pelaporan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian organisasi pada komponen evaluasi internal mendapatkan nilai 23,00 atau 92,00% dari bobot 25,00. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPK Perwakilan

Provinsi Gorontalo telah memenuhi kriteria pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara optimal yaitu telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan sumber daya yang memadai, namun belum ada upaya inovatif atau layak menjadi percontohan ditingkat satuan kerja terkait dengan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

B. CAPAIAN KINERJA

1. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menyusun IKU beserta target pencapaian kinerja Tahun 2024. Indikator Kinerja beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Tortama KN VI selaku Eselon I, dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo selaku Eselon II di Jakarta pada Bulan Desember Tahun 2023. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, target dan realisasi Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 hasil evaluasi Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dimuat pada tabel berikut.

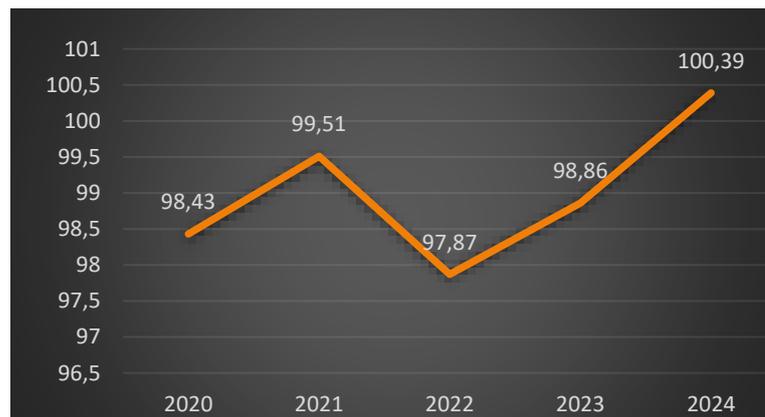
Tabel 3 Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No. (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	84,57%	84,57
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100,00%	100,00
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,13%	104,17
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,24%	100,24
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,00%	100,00
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101,17%	101,17
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)	Sangat Memuaskan (4,81)	100,00
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (90,05)	AA (91,40)	101,50
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	100,00%	102,04
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	102,86%	102,86
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,30)	105,00
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100,00%	100,00
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%	91,87%	105,00
Total Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo				100,39

2. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO PADA LIMA TAHUN TERAKHIR

Pada Tahun 2024, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebesar 100,39 Skor tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 98,86. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.

Grafik 1 Tren Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2020 s.d 2024



Grafik diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat peningkatan atas pencapaian kinerja Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat satu IKU yang tidak mencapai target Tahun 2024 yaitu IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.
- b. Terdapat sepuluh IKU yang mengalami peningkatan dan/atau tetap dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2023, yaitu IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, dan IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.
- c. Terdapat dua IKU yang mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 namun masih mencapai Target Tahun 2024, yaitu IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.

Adapun rincian pencapaian skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4 Perbandingan Capaian Tahun Pelaporan dengan Capaian Empat Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	IK 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	71,43%	86,25%	83,75%	82,86%	84,57%
	IK 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	IK 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	76,31%	72,83%	69,78%	72,48%	78,13%
	IK 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,40%	100,00%	100,68%	100,55%	100,24%
	IK 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100,00%	100,60%	100,07%	100,00%	100,00%
	IK 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	101,00%	100,30%	100,51%	100,00%	101,17%
	IK 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Memuaskan (4,47)	Memuaskan (4,41)	Sangat Memuaskan (4,80)	Sangat Memuaskan (4,79)	Sangat Memuaskan (4,81)
	IK 8. Hasil Evaluasi AKIP	AA (94,25)	AA (91,16)	AA (93,15)	AA (91,40)	AA (91,40)
	IK 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	99,66%	99,66%	90,27%	99,93%	100,00%
	IK 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	125%	137,50%	100,00%	101,43%	102,86%
	IK 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,47)	Memuaskan (3,89)	Memuaskan (3,65)	Sangat Memuaskan (4,61)	Sangat Memuaskan (4,30)
	IK 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	IK 13. Tingkat Kinerja Anggaran	89,34%	92,43%	90,04%	89,72%	91,87%
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo		98,43	99,51	97,87	98,86	100,39

3. PERBANDINGAN CAPAIAN IKU TAHUN 2024 DENGAN TARGET KERJA LIMA TAHUN

Perbandingan capaian IKU Tahun 2024 dengan target kerja lima Tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Target Kinerja Lima Tahun

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	84,57%	84,57
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	78,13%	104,17
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,24%	100,24
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	101,17%	101,17
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	4,81	Sangat Memuaskan (4,81)	100,00
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86)	A (87)	A (87)	A (89)	AA (90.05)	AA (91,40)	101,50
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	98%	100,00%	102,04
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	102,86%	102,86
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	Sangat Memuaskan (4,30)	105,00
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,50%	88,00%	88,50%	84,50%	91,87%	105,00

4. PENJELASAN ATAS CAPAIAN IKU TAHUN 2024

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat satu Indikator Kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan target pada Tahun 2024 yakni IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan. Adapun penjelasan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut.

a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.

Aktivitas pelaksanaan *QA* dan *QC* dilaksanakan dengan cara melaksanakan *QC* mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan oleh seluruh Ketua Tim, Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab dan Penanggung Jawab di setiap penugasan serta melaksanakan *QA* mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan untuk seluruh pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga mewajibkan tim pemeriksa

untuk menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sesuai petunjuk pelaksanaan KKP, dan menyimpan kertas kerja tersebut secara elektronik maupun secara fisik.

Metode pengukuran IKU adalah dengan perhitungan persentase dari 40% dikalikan hasil QA dan QC Satker ditambah 60% dikalikan hasil evaluasi EPP (tingkat akurasi 60% + tingkat konsistensi 40%). Sumber data yang digunakan adalah dokumen lembar *checklist* QA dan QC, hasil evaluasi EPP, dan hasil reviu Itama. Adapun perkembangan capaian IKU 1 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6 Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2020-2024

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	71,43%	86,25%	83,75%	82,86%	84,57%
Capaian	71,43%	86,25%	83,75%	82,86%	84,57%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	71,43%	86,25%	83,75%	82,86%	84,57%

Realisasi IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2024 adalah sebesar 84,57% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 84,57%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi (meningkat) dibandingkan nilai tahun sebelumnya sebesar 82,86%.

Ketidaktercapaian IKU 1 salah satunya disebabkan karena berdasarkan evaluasi dari EPP masih ditemukan kesalahan ketidakakuratan dan ketidakonsistenan yang perlu diperbaiki dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu belum berjalan secara optimal. Meskipun telah mengupayakan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih belum dapat memperoleh hasil evaluasi yang memadai dari Direktorat EPP sehingga skor yang dicapai Tahun 2024 masih berada pada angka 84,57%, dari target sebesar 100%.

Realisasi IKU Tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan berusaha memperbaiki kualitas penyusunan LHP, termasuk dengan memperketat evaluasi antar tim (*cross review*) serta melaksanakan diskusi dengan tim pemeriksa yang LHP-nya minim koreksi dari Direktorat EPP semester sebelumnya agar kiat-kiat penyusunan LHP dapat saling dibagikan di antara pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. BPK

Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk secara konsisten melaksanakan QA dan QC agar kualitas pemeriksaan dan LHP dapat senantiasa terjaga, sehingga pada tahun berikutnya dapat menaikkan capaian skornya sesuai target yang ditetapkan.

b. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam LHP Kinerja dan DTT yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT. Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP.

Aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU ini yaitu:

- 1) Rapat Koordinasi untuk meningkatkan kualitas LHP, memastikan tercapainya simpulan LHP di Perwakilan Gorontalo sesuai harapan penugasan yang telah ditetapkan dalam P2;
- 2) Memastikan penyusunan P2 LHP (terinci) secara berjenjang;
- 3) Melaksanakan reviu berjenjang Penyusunan P2 LHP (terinci);
- 4) Memastikan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan DTT dengan simpulan telah sesuai dengan P2.

Metode pengukuran IKU adalah dengan perhitungan persentase jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan dibagi jumlah LHP Kinerja dan DTT yang diterbitkan. Sumber data yang digunakan adalah P2 Kinerja dan DTT dan LHP Kinerja dan DTT. Adapun perkembangan capaian IKU 2 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7 Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2020-2024

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 mencapai

nilai yang sama dibandingkan Tahun sebelumnya sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan telah berjalan secara keseluruhan.

IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai Tahun 2020, dan saat itu BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk menjaga agar seluruh simpulan dari LHP sesuai dengan harapan penugasan pimpinan atau 100% untuk seluruh LHP, dan target 100% dapat dipertahankan secara konsisten sampai dengan Tahun 2024.

Realisasi IKU Tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. Oleh karena itu, untuk menjaga capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mengupayakan peningkatan kualitas QA dan QC, serta melakukan *cross review* serta diskusi terarah terkait setiap hasil pemeriksaan untuk melihat kesesuaian hasil pemeriksaan dengan harapan penugasan.

c. **IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada *auditee* sejak Tahun 2005. Data yang digunakan untuk mengukur realisasi indikator ini adalah data olahan dari IHPS terbaru pada Tahun berjalan yang diterbitkan oleh Direktorat EPP. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan upaya percepatan penyelesaian TLRHP untuk memenuhi target kinerja, melalui kegiatan:

- 1) penyampaian tindak lanjut langsung melalui SiPTL dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiPTL dengan terus mengkomunikasikan dengan Inspektorat Daerah masing-masing entitas;
- 2) membuka jalur konsultasi dan bimbingan percepatan TL;
- 3) inventarisasi tindak lanjut yang belum terselesaikan berdasarkan sebaran SKPD beserta penyebabnya;
- 4) memilah rekomendasi yang bersifat finansial dan non finansial;

- 5) berkoordinasi dengan Inspektorat selaku koordinator penyelesaian tindak lanjut agar lebih intens dalam melakukan monitoring TLRHP pada setiap SKPD;
- 6) menyarankan kepada entitas agar menjadikan penyelesaian tindak lanjut sebagai indikator penilaian kinerja satker (SKPD);
- 7) komitmen dari kepala daerah untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam tindak lanjut; dan
- 8) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki prosentase tertinggi dalam Penyelesaian Tindak Lanjut dan yang memiliki progres tertinggi Penyelesaian Tindak Lanjut dalam satu tahun; dan
- 9) berkoordinasi dengan Kantor Pusat dalam rangka percepatan validasi.

Upaya ini bermanfaat dalam mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, mengukur dampak atas hasil tindak lanjut rekomendasi BPK, mengidentifikasi permasalahan proses tindak lanjut, dan menyesuaikan rekomendasi agar selaras dengan perkembangan terkini sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa.

Metode pengukuran IKU adalah dengan perhitungan persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti ditambah jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dibagi jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee*.

Berdasarkan IHPS Semester I 2024, persentase penyelesaian TLRHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berada pada angka 78,13%. Adapun perkembangan capaian IKU 3 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8 Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2020-2024

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	76,31%	72,83%	69,78%	72,48%	78,13%
Capaian	101,75%	97,11%	93,04%	96,64%	104,17%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	101,75%	97,11%	93,04%	96,64%	104,17%

Realisasi IKU 3 Persentase TLRHP Tahun 2024 adalah sebesar 78,13% dari target sebesar 75%, sehingga capaiannya sebesar 104,17%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi (meningkat) dibandingkan nilai Tahun 2023 sebesar 72,48%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya percepatan penyelesaian TLRHP yang dilakukan telah berjalan secara optimal dan akan terus dilakukan upaya untuk meningkatkan sehingga dapat melebihi target 75,00%.

Meskipun telah melebihi target, masih terdapat beberapa hambatan atau tantangan dalam mencapai IKU ini, antara lain:

- 1) Komitmen dalam penyelesaian rekomendasi temuan belum sama di seluruh Organisasi Perangkat Daerah/Entitas, antara lain:
 - a) Majelis TP/TGR tidak berjalan efektif;
 - b) Penyelesaian TLRHP belum menjadi indikator pengukuran kinerja satker.
- 2) Pemahaman Terbatas
 - a) Substansi temuan dan rekomendasi belum dipahami dengan baik oleh entitas sehingga menyebabkan kesalahpahaman interpretasi rekomendasi.
 - b) Kurangnya pemahaman terkait kewajiban melaksanakan TLRHP. Pemeriksaan dianggap berakhir saat LHP diserahkan padahal seharusnya setelah rekomendasi selesai ditindaklanjuti.
- 3) Perubahan Regulasi
Regulasi yang menjadi kriteria pada temuan sudah dicabut/tidak berlaku.
- 4) Subjek PTL Tidak Ada
Subjek PTL meninggal/sakit, perusahaan bubar, bangkrut, dll.

Pada periode Renstra 2020 – 2024, di Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sempat mencapai persentase TLRHP sebesar 76,31%, dan capaian ini menurun pada Tahun 2021 menjadi 72,83% dan Tahun 2022 menjadi 69,78%. Kemudian, di Tahun 2024, persentase TLRHP meningkat menjadi sebesar 78,13% dan menjadi nilai tertinggi selama periode Renstra.

Realisasi IKU Tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. Oleh karena itu, untuk menjamin agar capaian di tahun berikutnya dapat memenuhi target, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mengoptimalkan upaya-upaya percepatan TLRHP melalui kegiatan:

- 1) penyampaian tindak lanjut langsung melalui SiPTL dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiPTL dengan terus mengkomunikasikan dengan Inspektorat Daerah masing-masing entitas;
- 2) Membuka kesempatan pemutakhiran tindak lanjut setiap bulan dan menjalin komunikasi intensif setiap triwulan untuk menampung kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut (konsultasi dan bimbingan percepatan TL);

- 3) Inventarisasi tindak lanjut yang belum terselesaikan berdasarkan sebaran OPD beserta penyebabnya;
- 4) Berkoordinasi dengan Inspektorat selaku koordinator penyelesaian tindak lanjut agar lebih intens dalam melakukan monitoring TLRHP pada setiap OPD;
- 5) Menyarankan kepada entitas agar menjadikan penyelesaian tindak lanjut sebagai indikator penilaian kinerja OPD;
- 6) Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki prosentase tertinggi dalam Penyelesaian Tindak Lanjut dan yang memiliki progres tertinggi Penyelesaian Tindak Lanjut dalam satu tahun; dan
- 7) Monitoring atas penyelesaian tindak lanjut dua minggu setelah LHP diserahkan.

d. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu Tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang, tugas, dan fungsi satuan kerja masing-masing dengan satu satuan kerja sebagai koordinator. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan terus berpartisipasi dalam setiap pemeriksaan tematik nasional selama Tahun 2023.

Metode pengukuran IKU adalah dengan perhitungan persentase realisasi pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya dibagi rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/signifikan lainnya ditambah alokasi penambahan skor. Alokasi penambahan skor dihitung oleh Direktorat PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh masing-masing Satuan Kerja pada setiap pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya. Sumber data yang digunakan adalah dokumen BAST LHP Tematik Nasional/Signifikan Lainnya, Surat Keluar Penyampaian LHP Tematik Nasional/Signifikan Lainnya, LHP Tematik Nasional/Signifikan Lainnya,

RKP, dan Surat Tugas Pemeriksaan LHP Tematik Nasional/Signifikan Lainnya. Adapun perkembangan capaian IKU 4 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9 Perkembangan Capaian IKU 4 Tahun 2020-2024

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,40%	100,00%	100,68%	100,55%	100,24%
Capaian	100,40%	100,00%	100,68%	100,55%	100,24%
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	100,40%	100,00%	100,68%	100,55%	100,24%

Realisasi IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2024 adalah sebesar 100,24% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,24%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih rendah (mengalami penurunan) dibandingkan Tahun sebelumnya sebesar 100,55%, namun masih mencapai target 100,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional telah berjalan secara keseluruhan. Penurunan nilai capaian IKU Tahun 2024 disebabkan karena alokasi penambahan skor dari Direktorat PSMK atas pemeriksaan Tematik Nasional yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan Tahun 2023.

Upaya yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi IKU ini adalah ikut berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional terkait Pemeriksaan Kinerja atas Pengendalian Banjir pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai Tahun 2020, meskipun sejak periode Renstra 2016 – 2020 sebelumnya BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menunjukkan partisipasi aktif dalam seluruh pemeriksaan tematik nasional, yaitu dengan berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional diantaranya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif. Sama seperti Tahun sebelumnya, pada Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara konsisten berpartisipasi aktif dalam setiap pemeriksaan tematik nasional, sehingga capaian IKU ini bisa tetap mencapai target seperti Tahun 2023.

Realisasi IKU Tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. Oleh karena itu,

untuk tahun selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional.

e. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan ini dikoordinir oleh AUI dan Pusat Kemitraan Global. Satuan Kerja pemeriksaan lainnya dapat berkontribusi dalam pemeriksaan tersebut melalui kontribusi tenaga pemeriksa.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan menugaskan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk terlibat dalam pemeriksaan yang diperintahkan Badan yang dikoordinir oleh AUI dan Pusat Kemitraan Global guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada.

Metode pengukuran IKU adalah dengan jumlah pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang disetujui dan dipenuhi oleh BPK, yang melibatkan pemeriksa di Satuan Kerja Pemeriksaan terkait ditambah alokasi penambahan skor. Alokasi penambahan skor dihitung oleh Direktorat PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh masing-masing satker pada setiap pemeriksaan pemenuhan permintaan dari pemangku kepentingan.

Sumber data yang digunakan adalah Surat Tugas Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan. Adapun perkembangan capaian IKU 5 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10 Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2020-2024

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,60%	100,07%	100%	100%
Capaian	100%	100,60%	100,07%	100%	100%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	100%	100,60%	100,07%	100%	100%

Realisasi IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Realisasi IKU 5 pada Tahun 2024 masih sama dengan realisasi pada tahun sebelumnya sebesar 100,00%.

IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai Tahun 2020, dan secara konsisten dicapai sesuai target pada Tahun 2020 s.d. Tahun 2024. Selama Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berupaya untuk dapat memenuhi 100,00% permintaan kontribusi tenaga pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo oleh AUI atau Kemitraan Global untuk melaksanakan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan, meskipun sampai tanggal 31 Desember 2024 tidak ada permintaan dari AUI atau Kemitraan Global yang masuk.

Realisasi IKU Tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. Oleh karena itu, kedepannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten berupaya untuk memenuhi kontribusi keterlibatan tenaga pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam memenuhi permintaan pemeriksaan yang masuk dari para pemangku kepentingan apabila adanya permohonan dari AUI dan Pusat Kemitraan Global.

f. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra dan dilakukan pada beberapa entitas dalam satu Tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's.

Metode pengukuran IKU adalah dengan perhitungan persentase realisasi pemeriksaan tematik lokal dibagi rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal ditambah alokasi penambahan skor. Alokasi penambahan skor

dihitung oleh Direktorat PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh masing-masing satker pada setiap pemeriksaan pemenuhan permintaan dari pemangku kepentingan. Sumber data yang digunakan adalah BAST LHP Tematik Lokal, Surat Keluar Penyampaian LHP Tematik Lokal, LHP Tematik Lokal, Surat Tugas Pemeriksaan LHP Tematik Lokal, dan RKP. Adapun perkembangan capaian IKU 6 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11 Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2020-2024

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101%	100,30%	100,51%	100%	101,17%
Capaian	101%	100,30%	100,51%	100%	101,17%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	101%	100,30%	100,51%	100%	101,17%

Realisasi IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2024 adalah sebesar 101,17% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 101,17%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 mengalami peningkatan (lebih tinggi) dibandingkan nilai pada Tahun sebelumnya sebesar 100,00%. Peningkatan tersebut disebabkan karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2024 terlibat dalam Tematik Lokal sehingga memperoleh alokasi penambahan skor dari Direktorat PSMK. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal telah berjalan secara keseluruhan.

IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai Tahun 2020, dan secara konsisten dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sesuai Renstra 2020 s.d. 2024 sehingga capaian pada Tahun 2020 s.d. 2024 mencapai target 100% yang ditetapkan.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini pada Tahun 2024 adalah dengan melaksanakan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan APBD dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga capaian Indikator Kinerja ini dapat memperoleh skor 100,00%.

Realisasi IKU Tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. Oleh karena itu, kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mengupayakan untuk terlibat dalam pemeriksaan tematik lokal.

g. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman nilai-nilai dasar (Integritas, Independensi, dan Profesionalisme) oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami nilai dasar BPK.

Metode pengukuran IKU adalah dengan penilaian dari hasil survei dengan skala hasil survei, yaitu 1,00 - 1,99 adalah sangat tidak memuaskan, 2,00 - 2,99 adalah tidak memuaskan, 3,00 - 3,99 adalah memuaskan, dan 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator. Perkembangan capaian IKU 7 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12 Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2020-2024

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	4,81
Realisasi	4,47	4,41	4,80	4,79	4,81
Capaian	89,40%	88,20%	96,00%	95,80%	100%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	92,93%	92,20%	99,79%	99,58%	100%

Realisasi IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2024 adalah sebesar 4,81 dari target sebesar 4,81, sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 mengalami peningkatan (lebih tinggi) dibandingkan nilai pada Tahun sebelumnya sebesar 4,79. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi nilai dasar yang ditanamkan dan diterapkan oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah optimal.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2024 telah melaksanakan berbagai upaya untuk mencapai target IKU 7 melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pegawai BPK terkait dengan nilai dasar BPK. Upaya tersebut diantaranya adalah pengarahan dari Kepala Perwakilan, membentuk tim pengembangan dan internalisasi budaya kerja, mensosialisasikan melalui berbagai media, meningkatkan sosialisasi Visi, Misi, dan Nilai Dasar serta Kode Etik BPK dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang

dilaksanakan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo serta menginformasikan kepada responden-responden terpilih untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK yang disebarakan setiap Tahun dan melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa menyelesaikan seluruh survei yang dikirim.

Realisasi IKU Tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus menjaga dan meningkatkan capaian ini pada Tahun berikutnya, dengan meningkatkan sosialisasi Visi, Misi, dan Nilai Dasar serta Kode Etik BPK dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo serta menginformasikan kepada responden-responden terpilih untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK yang disebarakan setiap Tahun dan melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa menyelesaikan seluruh survei yang dikirim.

h. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, and pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Permen PAN RB 88/2021 Pasal 1 (2)).

Predikat penilaian Hasil Evaluasi AKIP adalah Sangat Memuaskan (>90-100), A adalah Memuaskan (>80-90), BB adalah Sangat Baik (>70-80), B adalah Baik (>60-70), CC adalah Cukup (>50-60), C adalah Kurang (>30-50), D adalah Sangat Kurang (0-30). Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Metode pengukuran IKU adalah melalui evaluasi yang dilaksanakan dalam dua tahap:

- 1) *Self- assessment* oleh satuan kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPK; dan
- 2) Evaluasi AKIP oleh Itama atas satuan kerja Eselon I dan/atau Eselon II (sampling).

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Itama yang memuat hasil evaluasi AKIP Unit Kerja oleh Itama dan hasil

evaluasi/penilaian mandiri Satuan Kerja. Adapun perkembangan capaian IKU 8 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13 Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2020-2024

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
Realisasi	AA (94,25)	AA (91,16)	AA (93,15)	AA (91,40)	AA (91,40)
Capaian	109,59%	104,78%	105,00%	102,70%	101,50%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	104,66%	101,23%	103,44%	101,50%	101,50%

Realisasi IKU 8 Hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 adalah sebesar 91,40 dari target sebesar 90,05, sehingga capaiannya sebesar 101,50%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 masih memiliki nilai yang sama dibandingkan pada Tahun sebelumnya sebesar 91,40. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan AKIP yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berjalan dengan baik sehingga dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi AKIP, masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yaitu belum terdapat upaya inovatif tingkat perwakilan dalam hal Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan/atau Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai nilai AA sesuai dengan target yang diharapkan, serta masuk ke dalam jajaran sepuluh besar unit kerja dengan hasil evaluasi terbaik di BPK secara nasional. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga telah mempertahankan nilai evaluasi dari Inspektorat Utama BPK dengan mencapai nilai AA.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan terus mengupayakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara tertib dan memperhatikan arahan-arahan/catatan dari Inspektorat Utama BPK serta menjalin komunikasi intensif dengan Itama untuk memperoleh masukan-masukan demi perbaikan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja yang berkesinambungan.

Realisasi IKU Tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan akuntabilitasnya dengan terus melaksanakan

rekomendasi/catatan dari Inspektorat Utama BPK dan menyusun inovasi tingkat perwakilan dalam hal Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan/atau Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

i. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL). Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Komponen-komponen pengukuran IKU 9 terdiri atas:

- 1) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM diukur dengan memperhatikan kebaruan data (*updating*) data masing-masing pegawai dalam satu Unit/Satuan Kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, informasi pegawai, dan riwayat seminar/*workshop*/sosialisasi/sejenis.
- 2) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN diukur dengan memperhatikan *log* akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas Surat Masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Struktural Terakhir dalam satu Unit/Satuan Kerja.
- 3) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satu Unit/Satuan Kerja Pemeriksaan.
- 4) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP diukur dengan memperhatikan *log* akses aplikasi SiAP aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemeriksa pada yang masuk dalam Surat Tugas Pemeriksaan dalam aplikasi SiAP yang meliputi inisiasi sub-pemeriksaan, pengisian HP3, reviu, dan pelaporan (mis. temuan, KHP, LHP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan baik interim/pendahuluan maupun terinci.
- 5) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL diukur dengan memperhatikan status Bahan Tindak Lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada Unit/Satuan Kerja.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Metode pengukuran IKU adalah dengan perhitungan persentase 20% dikalikan tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM, ditambah 15% dikalikan tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN, ditambah 20% dikalikan tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP, ditambah 20% dikalikan tingkat pemanfaatan aplikasi SiAP dan 25% dikalikan tingkat pemanfaatan aplikasi SiPTL. Sumber data yang digunakan adalah laporan monitoring Biro TI atas pemantauan layanan TI. Adapun perkembangan capaian IKU 9 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14 Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2020-2024

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	98%
Realisasi	99,66%	99,66%	90,27%	99,93%	100%
Capaian	104,91%	103,81%	93,07%	101,97%	100%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	101,69%	101,69%	92,11%	104,09%	102,04%

Realisasi IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2024 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 98%, sehingga capaiannya sebesar 102,04%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 mengalami peningkatan (lebih tinggi) dibandingkan Tahun sebelumnya sebesar 99,93%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi dan informasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berjalan secara optimal. Rincian capaian kinerja tingkat pemanfaatan TI adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM = 100,00%
- 2) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN = 100,00%
- 3) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP = 100,00%
- 4) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP = 100,00%
- 5) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL = 100,00%.

Upaya yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) melakukan inventarisasi nama pegawai yang belum melengkapi dan/atau memuktahirkan data dan/atau dokumen di Aplikasi SISDM;
- 2) mengisi SiAP LKPD, DTT, dan Kinerja;
- 3) memonitoring dan menindaklanjuti seluruh surat masuk di Aplikasi JASMIN;
- 4) menginput data dan/atau dokumen hasil pemeriksaan pada Aplikasi SMP;

- 5) memonitoring dan/atau menelaah setiap dokumen tindak lanjut yang telah diinput dalam Aplikasi SiPTL; dan
- 6) berkoordinasi dengan Biro TI melalui Aplikasi MELATI terkait kendala-kendala yang dialami selama Tahun 2024.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai tingkat pemanfaatan TI sebesar 99,59%, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berupaya untuk terus mempertahankan tingkat pemanfaatan TI agar dapat berada di atas target. Target ini dapat dicapai selama dua Tahun berturut-turut yaitu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, namun mengalami penurunan di Tahun 2022 dan meningkat kembali dengan signifikan di Tahun 2023. Berdasarkan hasil laporan monitoring Biro TI atas pemantauan layanan TI diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2024 telah optimal dengan mendapatkan nilai 100% dalam pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan seperti SiAP, SMP, SiPTL dan non pemeriksaan seperti SISDM dan JASMIN.

Realisasi IKU pada Tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. Oleh karena itu, kedepannya, BPK Perwakilan Gorontalo akan terus mengupayakan agar capaian Tahun 2024 yang diperoleh dapat dipertahankan pada tahun berikutnya dengan terus mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun non pemeriksaan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh aplikasi yang dimiliki oleh BPK secara keseluruhan, baik untuk pemeriksaan maupun non pemeriksaan. BPK Perwakilan Gorontalo bahkan telah memiliki portal internal yang dinamakan GOROPS dan Portal BPK, sebagai sarana *data sharing* untuk memperlancar pekerjaan di setiap subbagian di bawah Sekretariat Perwakilan serta Subauditorat Gorontalo. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Tingkat Pemanfaatan TI setiap Triwulanan.

j. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran,

serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. *Innovative Practice* menekankan pada inovasi/kebaruan/*update* atas *Best Practice* yang ada dan dapat direalisasikan melalui:

- 1) Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap Tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.
- 2) Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Metode pengukuran IKU adalah dengan perhitungan persentase 50% dikalikan tingkat penyusunan *innovative practice* ditambah 50% dikalikan tingkat pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan. Sumber data yang digunakan adalah laporan pelaksanaan manajemen pengetahuan yang mencakup usulan *best practice*, laporan atas penerapan *best practice*, dan laporan atas pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan. Adapun perkembangan capaian IKU 10 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15 Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2020-2024

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	125%	137,50%	100,00%	101,43%	102,86%
Capaian	125%	137,50%	100,00%	101,43%	102,86%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	125%	137,50%	100,00%	101,43%	102,86%

Realisasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2024 adalah sebesar 102,86% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 102,86%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi (meningkat) dibandingkan nilai pada Tahun 2023 sebesar 101,43%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas penerapan manajemen pengetahuan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berjalan sangat baik dan optimal.

IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai Tahun 2020. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen mencapai tingkat penerapan manajemen pengetahuan sebesar 100%, dan target tersebut telah dapat dicapai selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Aktivitas yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target IKU 10 adalah sebagai berikut.

- 1) Menyusun Laporan Manajemen Pengetahuan dengan rincian aktivitas sebagai berikut:
 - a) Aktivitas Manajemen Pengetahuan - Forum Berbagi Pengetahuan
 - (1) Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Pegawai Sehubungan Dengan Pelaksanaan Prisma SKP IKI;
 - (2) Edukasi Penguatan Integritas dan Pengarahan Kepala Perwakilan Dalam Rangka Penegakan Nilai-Nilai Dasar BPK;
 - (3) Kegiatan Sosialisasi Penyusunan RKA 2024;
 - (4) Berbagai Pengetahuan tentang Pengantar Ilmu Manajemen dan Bagaimana Menerapkan Ilmu Manajemen dalam Pekerjaan Sehari-Hari; dan
 - (5) Berbagi Pengetahuan tentang Memahami Mekanisme dan Prosedur Perhitungan Kerugian Negara/Daerah serta Modus Operandi *Fraud* Dalam Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan.
 - b) Aktivitas Manajemen Pengetahuan - Bantuan Rekan Sejawat
 - (1) Pengelolaan prisma pengadaan barang dan jasa kepada inputer Tahun 2024.
 - (2) Pengelolaan Jasmin, SMP, SIPTL, SiAP dan Pengelolaan Perpustakaan serta WA Bisnis perwakilan kepada pegawai yang baru mutasi internal di Subbagian Humas dan TU Kalan.

- c) Aktivitas Manajemen Pengetahuan - Reviu Pasca Aktivitas yaitu Pembahasan Konsep KHP LKPD TA 2023 Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
- 2) Menyusun dan menyampaikan usulan *Best Practice* terkait Optimalisasi Informasi Hukum (JDIH Perwakilan) pada *Website* BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 287/ND/XIX.GOR/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024. Atas usulan tersebut, Kepala Direktorat PSMK telah memberikan persetujuan bahwa Usulan *Best Practice* dapat diakui sebagai capaian Indikator Kinerja “Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan” Tahun 2024 pada Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Nota Dinas Nomor 835/ND/XII.1/12/2024 tanggal 10 Desember 2024.

Realisasi IKU Tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. Oleh karena itu, kedepannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menjaga capaian IKU ini dengan terus mengupayakan berbagai inovasi yang dituangkan dalam usulan *best practice* atau replikasi *best practice*, serta melaksanakan manajemen pengetahuan atas seluruh kegiatan yang bermanfaat bagi pemeriksaan maupun non pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

k. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan BPK Perwakilan.

Metode pengukuran IKU adalah dengan penilaian dari hasil survei dengan skala hasil survei, yaitu 1,00 - 1,99 adalah sangat tidak memuaskan, 2,00 - 2,99 adalah tidak memuaskan, 3,00 - 3,99 adalah memuaskan, 4,00 - 5,00 adalah sangat memuaskan. Sumber data yang digunakan adalah laporan hasil survei pengukuran indikator. Adapun perkembangan capaian IKU 11 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16 Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2020-2024

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Realisasi	3,47	3,89	3,65	4,61	4,30
Capaian	91,32%	102,37%	96,05%	105,00%	105,00%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	91,32%	102,37%	96,05%	105,00%	105,00%

Realisasi IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2024 adalah sebesar 4,30 dari target sebesar 3,80, sehingga capaiannya sebesar 105,00%. Realisasi IKU 11 pada Tahun 2024 lebih rendah (menurun) dibandingkan nilai tahun sebelumnya sebesar 4,61, namun capaian ini masih memenuhi target yang telah ditetapkan Tahun 2024. Penurunan IKU 11 disebabkan karena kurangnya penyebaran informasi dan monitoring pelaksanaan survei kepada pihak responden eksternal.

Aktivitas yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk dapat mencapai kinerja Tahun 2024 adalah dengan melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat *entry meeting* pemeriksaan LKPD untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan, melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat *entry meeting* pemeriksaan kinerja dan DTT untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan serta menyampaikan kuesioner kepuasan kepada pemangku kepentingan yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut.

IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai Tahun 2020, dan untuk periode Renstra 2020 - 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mencapai nilai kepuasan 3,80 atau dengan predikat “Memuaskan” dari para pemangku kepentingan. Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat melampaui target dengan memperoleh capaian sebesar 3,89. Namun pada Tahun 2022 berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dengan capaian sebesar 3,65. Selanjutnya, di Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berhasil melaksanakan evaluasi sehingga dapat melampaui target dengan memperoleh capaian sebesar 4,61, Namun, diakhir periode renstra, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memperoleh capaian sebesar 4,30.

Realisasi IKU pada Tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya mengomunikasikan posisi, tugas dan fungsi BPK, serta menjaga kualitas hubungan dan komunikasi tidak hanya dengan entitas yang diperiksa namun juga dengan seluruh *stakeholders* lain di Provinsi Gorontalo termasuk pihak swasta yang menjadi mitra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo seperti media dan penyedia jasa.

I. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

- 1). Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 Tahun (SPKN);
- 2). Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 Tahun (UU Nomor 5/2014);
- 3). Standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP seTahun untuk pemeriksa dan 20 JP seTahun untuk non pemeriksa; dan
- 4). Pengembangan kompetensi yang dimaksud tidak termasuk Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional dan Diklat Kepemimpinan.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam dua Tahun atau 40 jam pelajaran dalam satu Tahun serta melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam satu Tahun.

Metode pengukuran IKU adalah dengan perhitungan persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat dibagi jumlah seluruh pegawai. Sumber data yang digunakan adalah bezzeting pegawai, SK mutasi, nota dinas penempatan,

sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh Pusdiklat, Biro SDM, dan Institusi Eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja, serta sertifikat KTF atau *In House Training* yang diadakan oleh satuan kerja dengan persetujuan Badiklat PKN. Adapun perkembangan capaian IKU 12 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17 Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020-2024

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 sama dengan nilai pada Tahun sebelumnya sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas jam diklat pengembangan kompetensi oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berjalan secara baik.

Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memenuhi target jam pelajaran yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan pelaksanaan diklat *in-house* berupa diklat pemeriksaan LKPD, diklat klasikal yang dilaksanakan oleh Badiklat PKN serta mengoptimalkan diklat-diklat daring yang semakin mudah diakses oleh setiap pegawai.

Realisasi IKU Tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. Oleh karena itu, kedepannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mendorong pencapaian target kinerja ini dengan tetap melaksanakan diklat *in-house* serta memberikan informasi terkait diklat-diklat daring baik yang diselenggarakan oleh Internal BPK maupun oleh Institusi Eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja.

m. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas perencanaan dan penggunaan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 yang dilakukan pada Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA)

mandiri. Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA Perencanaan Anggaran adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. EKA Perencanaan Anggaran yang diukur dengan dua variabel, yaitu:

- 1) Efektivitas, diukur dengan capaian RO (75%)
- 2) Efisiensi, diukur dari penggunaan SBK (10%) serta efisiensi SBK (15%)

EKA Pelaksanaan Anggaran yang merupakan rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran EKA Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, adalah sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA (10%)
- 2) Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- 3) Penyerapan Anggaran (20%)
- 4) Belanja Kontraktual (10%)
- 5) Penyelesaian Tagihan (10%)
- 6) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- 7) Dispensasi SPM (5%)
- 8) Capaian output (25%).

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Metode pengukuran IKU adalah dengan perhitungan persentase 50% dikalikan nilai EKA Perencanaan Anggaran ditambah 50% dikalikan nilai EKA Pelaksanaan Anggaran. Sumber data yang digunakan adalah rekapitulasi perhitungan kinerja anggaran (Biro Keuangan).

Hasil validasi dari Biro Keuangan BPK atas penilaian EKA Perencanaan Anggaran dan EKA Pelaksanaan Anggaran untuk BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nilai EKA Perencanaan Anggaran adalah sebesar 85,00%; dan

2) Nilai EKA Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar 98,74%.

Adapun perkembangan capaian IKU 13 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18 Perkembangan Capaian IKU 13 Tahun 2020-2024

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,50%	88,00%	88,50%	84,50%
Realisasi	89,34%	92,43%	90,04%	89,72%	91,87%
Capaian	102,69%	105,63%	102,32%	101,38	105,00%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	105,73%	109,38%	106,56%	106,18%	105,00%

Realisasi IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar 91,87% dari target sebesar 84,50%, sehingga capaiannya sebesar 105,00%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan nilai pada Tahun sebelumnya sebesar 89,72. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan kinerja anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah optimal.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai tingkat kinerja anggaran sebesar 87,78%, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berupaya untuk terus mempertahankan capaian tingkat kinerja anggaran agar minimal dapat di atas 87,50%, dan selama lima Tahun berturut-turut yaitu Tahun 2020 sampai dengan 2024 target tersebut dapat dilampaui.

Dalam rangka memenuhi Target IKU 13, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara konsisten menjaga kualitas pemanfaatan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan terus memperhatikan arahan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan serta Unit Kerja lain di BPK yang relevan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja juga melaksanakan aktivitas sebagai berikut:

- 1) memaksimalkan pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi;
- 2) melaksanakan penajaman kegiatan prioritas, efisiensi, dan optimalisasi terhadap pagu anggaran yang ada pada DIPA/POK Satker;
- 3) memonitoring dan memastikan pencapaian target Rencana Output (RO) melalui Subbagian Keuangan; dan

- 4) melaksanakan koordinasi secara berkala antara Subbagian Keuangan dengan unit kerja lainnya terkait dengan permasalahan dan/atau kendala dalam rangka penyelesaian target RO.

Realisasi IKU Tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga capaian tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Subbagian Keuangan akan secara konsisten menjaga kualitas pemanfaatan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan terus memperhatikan arahan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan serta Unit Kerja lain di BPK yang relevan.

C. ANALISIS EFISIENSI

Dalam rangka mewujudkan Strategi 2 - Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif serta memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi

- a) Pemanfaatan Aplikasi JASMIN. Aplikasi JASMIN digunakan untuk mengelola surat menyurat kedinasan internal/eksternal BPK yang meliputi administrasi surat masuk, administrasi surat keluar, pendelegasian tugas dan tindak lanjut tugas. Hal ini sekaligus berdampak kepada efisiensi belanja operasional.
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan). Aplikasi SiAP yang digunakan oleh pemeriksa dalam mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses reviu secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam menghemat anggaran biaya perjalanan dinas dan mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.
- c) Mengubah metodologi pemantauan TLRHP yang semula secara manual menjadi sistem informasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Aplikasi SIPTL merupakan aplikasi atas pemantauan TLRHP yang dapat

diakses oleh entitas yang diperiksa untuk mengunggah dokumen tindak lanjut dan memantau penetapan status tindak lanjut oleh BPK. Aplikasi ini juga digunakan oleh internal BPK untuk validasi dokumen, penelaahan, validasi tindak lanjut dan persetujuan penetapan status TLRHP secara berjenjang. Adanya perubahan metodologi pemantauan ini memberikan manfaat bagi internal BPK dan pihak entitas yang diperiksa. Manfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang, fleksibilitas waktu validasi dan persetujuan status TLRHP secara berjenjang, serta pemantauan TLRHP bersifat *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak entitas yang diperiksa berupa efisiensi anggaran terkait perjalanan dinas dan belanja barang, serta fleksibilitas waktu pemantauan status TLRHP.

- d) Optimalisasi Portal Satuan Kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
- Portal BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo merupakan salah satu *tools* bagi pegawai pada kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mengatasi permasalahan terkait sharing informasi. Portal perwakilan selain berfungsi sebagai media komunikasi melalui fitur discussion board dan media kolaborasi, juga dapat dimanfaatkan sebagai media *file sharing/repository* untuk mendukung pengelolaan dokumen di satuan kerja. Optimalisasi Portal membantu BPK Perwakilan dalam mengelola kinerja organisasi, mempermudah dan meningkatkan efisiensi operasional kerja sehingga mampu mendorong peningkatan produktivitas kinerja organisasi. Bagi pegawai, selain dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja individu juga dapat mempermudah aktivitas kolaborasi. *Stakeholder* pun akan mendapatkan manfaat kemudahan, kecepatan, dan menghemat tenaga dan biaya dalam mendapatkan layanan BPK Perwakilan.
- e) Pemanfaatan layanan konsultasi hukum *online* untuk memudahkan aktivitas manajemen pengetahuan. Konsultasi hukum *online* ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai baik penunjang/pendukung maupun pemeriksa. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan.
- f) Penggunaan media *zoom* dan/atau *microsoft teams* untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo beberapa kali melaksanakan kegiatan melalui media *zoom* dan/atau *microsoft teams*, diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Kegiatan Edukasi Penguatan Integritas yang melibatkan Inspektorat Utama BPK, pegawai dan suami/istri BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- 2) Kegiatan Forum Berbagi Pengetahuan “Memahami Mekanisme dan Prosedur Perhitungan Kerugian Negara/Daerah serta Modus Operandi *Fraud* Dalam Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah Yang Dipisahkan” yang melibatkan seluruh Kejaksaan se-Provinsi Gorontalo, Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo, AUI BPK, dan seluruh Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- 3) Kegiatan Koordinasi Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Penggunaan media *zoom* dan/atau *microsoft teams* dapat menghemat anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan Belanja Bahan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat melaksanakan kegiatan dengan mengundang banyak orang/instansi dengan keterbatasan auditorium.

2. Pengelolaan BMN

Upaya yang dilakukan untuk efisiensi adalah melakukan penghapusan BMN yang tidak digunakan lagi untuk mengurangi biaya pemeliharaan. Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penghapusan aset tetap berupa taman permanen dan taman non permanen. Selain itu, dilaksanakan pula pemusnahan arsip inaktif yang telah memenuhi umur sesuai ketentuan. Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melaksanakan pemusnahan arsip sebanyak 201 boks arsip sebagai upaya efisiensi dan efektivitas kerja serta penyelamatan informasi arsip dari pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya.

D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA

Sebagai upaya Perwakilan Gorontalo menyamakan kebiasaan dan pola pikir seluruh individu pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, telah dikembangkan Budaya Kerja “TINEPO” untuk dapat mendukung peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara berkesinambungan. Budaya Kerja “TINEPO” singkatan dari Tangguh, Integritas dan Independen, Nyaman, Empati, Profesionalisme, dan Kolaboratif. Budaya Kerja “TINEPO” telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 6/SK/XIX.GOR/03/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo Badan Pemeriksa Keuangan Nomor

10/SK/XIX.GOR/01/2023 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berupaya mempertahankan sekaligus terus meningkatkan budaya kerja yang telah terbangun selama ini dengan menumbuhkan rasa saling peduli, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar BPK yang telah tertanam sebelumnya. Budaya kerja yang telah berjalan dengan baik ini akan ikut memunculkan pola berpikir yang positif kepada seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pola pikir dari setiap pegawai terus ditanamkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak hanya sekedar menyelesaikan pekerjaannya saja, namun setiap pegawai ditanamkan pola berpikir untuk bekerja dengan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sehingga hal tersebut dapat menimbulkan dampak positif tidak hanya bagi diri sendiri namun bagi orang lain dan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara keseluruhan. Hal inilah yang selama ini menjadi faktor pendukung dalam kaitannya ketercapaian kinerja dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan menanamkan budaya kerja dan pola berpikir bekerja untuk menghasilkan suatu manfaat.

E. REALISASI ANGGARAN

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada TA 2024 memperoleh anggaran sebesar Rp18.078.290.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp17.900.531.539,00 atau 99,02% dari anggaran. Anggaran dan realisasi tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran dan realisasi TA 2023 yakni anggaran sebesar Rp16.737.520.000,00 dan realisasi sebesar Rp16.693.869.032,00 atau 99,74% dari anggaran.

Selama TA 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengalami penyesuaian anggaran sebanyak 14 kali, dari nilai anggaran awal sebesar Rp18.250.010.000 kemudian dirasionalisasi menjadi sebesar Rp18.078.290.000. Meskipun terdapat rasionalisasi, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mengupayakan efisiensi pemanfaatan anggaran sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dan tidak ada *output* serta *outcomes* yang berkurang.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai satu program yakni Program Pemeriksaan Keuangan Negara, yang kemudian dialokasikan untuk mencapai Indikator Kinerja yang ditargetkan selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output	Indikator Kinerja
1.	44.877.000	44.820.690	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	a. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. b. Tingkat Kinerja Anggaran.
2.	9.195.630.000	9.184.833.544	Layanan Perkantoran	a. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi. b. Tingkat Kinerja Anggaran.
3.	307.776.000	306.869.105	Layanan Sarana Internal	a. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi. b. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. c. Tingkat Kinerja Anggaran.
4.	199.000.000	198.800.000	Layanan Prasarana Internal	a. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. b. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi. c. Tingkat Kinerja Anggaran.
5.	87.422.000	87.421.200	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	a. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan. b. Tingkat Kinerja Anggaran.
6.	3.955.000	3.955.000	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	a. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan. b. Tingkat Kinerja Anggaran
7.	58.601.000	58.600.532	Sumbangan IHPS Perwakilan	a. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. b. Tingkat Kinerja Anggaran.
8.	3.570.000	3.570.000	Laporan Profil Entitas Perwakilan	a. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi. b. Tingkat Kinerja Anggaran.
9.	115.653.000	114.836.749	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan	a. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. b. Tingkat Kinerja Anggaran.
10.	42.031.000	42.031.000	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada BPK Perwakilan	a. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. b. Tingkat Kinerja Anggaran.
11.	756.327.000	676.029.960	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	a. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan. b. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi. c. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan. d. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK. e. Tingkat Kinerja Anggaran.
12.	1.629.873.000	1.549.204.116	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	a. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi. b. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi. c. Hasil Evaluasi AKIP. d. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK. e. Tingkat Kinerja Anggaran.
13.	5.633.575.000	5.629.559.643	LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	a. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan. b. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang

No.	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output	Indikator Kinerja
				Memenuhi Harapan Penugasan. c. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal. d. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional. e. Tingkat Kinerja Anggaran.

F. INOVASI

BPK perlu melakukan langkah inovasi dalam pelaksanaan tugas fungsinya untuk meningkatkan peranannya dalam pemeriksaan keuangan negara. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tugas dan fungsinya dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan optimal. Selain itu, dengan adanya inovasi dapat meningkatkan pelayanan publik kepada seluruh *stakeholder* sehingga dapat membangun rasa percaya yang lebih kepada BPK. Hal ini tidak terkecuali dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah melakukan langkah inovasi, baik dalam hal pemeriksaan maupun dalam hal pelayanan publik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan perwakilan. Adapun inovasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yaitu:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemeriksaan dan Pemantauan TLRHP-Runeg Pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Dalam rangka memenuhi sasaran BPK secara keseluruhan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terutama Subauditorat Gorontalo telah berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol), pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di lingkup pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo sesuai wilayah tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Pengoptimalan pemanfaatan TI ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pemeriksaan, memanfaatkan kemajuan teknologi yang telah dikembangkan dengan serius oleh BPK, serta untuk mengamankan seluruh data serta proses bisnis pemeriksaan dan pemantauan yang dilakukan oleh Subauditorat Gorontalo.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SiAP-LK dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Dalam rangka memenuhi sasaran BPK secara keseluruhan dan untuk mencegah adanya langkah yang tidak dilaksanakan serta tidak selesainya penyusunan KKP LKPD, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terutama Subauditorat Gorontalo telah berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu dengan cara memanfaatkan aplikasi Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan (SiAP-LK) dalam pemeriksaan LKPD se-Provinsi Gorontalo sesuai wilayah tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Pemanfaatan SiAP-LK ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pemeriksaan, memanfaatkan kemajuan teknologi yang telah dikembangkan dengan serius oleh BPK, serta untuk mengamankan seluruh data serta proses bisnis pemeriksaan dan pemantauan yang dilakukan oleh Subauditorat Gorontalo.

3. Pemilihan dan Penugasan Tenaga Ahli yang Bekerja untuk dan Atas Nama BPK dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 23/SK/XIX.GOR/03/2021 menetapkan instruksi kerja mekanisme pemilihan dan penugasan Tenaga Ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara dan pelaporan hasil pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) sehingga *ouput* atas pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat tepat sasaran dan bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan.

4. Pembuatan Video Podcast

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 40/SK/XIX.GOR/07/2021 menetapkan instruksi kerja mekanisme pembuatan *video podcast*. Hal ini dimaksudkan dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo kepada para *stakeholder* dan membangun komunikasi yang baik dengan *stakeholder* serta partisipasi dari *stakeholder* BPK maka diperlukan suatu media komunikasi yang menarik.

5. Optimalisasi Portal Satuan Kerja dan Pengembangan *Smart Office* BPK Gorontalo (SOFIE-GO)

Portal satuan kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo merupakan salah satu *tool* bagi pegawai pada kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mengatasi permasalahan terkait sharing informasi. Portal perwakilan selain berfungsi sebagai media komunikasi melalui fitur *discussion board* dan media kolaborasi, juga dapat dimanfaatkan sebagai media *file sharing/repository* untuk mendukung pengelolaan dokumen di satuan kerja.

BPK Perwakilan Gorontalo sebelumnya telah memiliki portal perwakilan, namun demikian tampilan situs, halaman situs, dan menu yang terdapat dalam portal satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih perlu ditingkatkan dan perlu dibuat agar *user friendly*, serta penggunaannya belum optimal serta informasi di dalamnya belum terkini/mutakhir (*update*).

Pengembangan portal telah dilaksanakan sejak Bulan Juni 2022 sampai dengan 2023. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan *redesain portal* dan menambahkan beberapa *folder sharing* disetiap unit kerja. Selanjutnya di Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melakukan pengembangan lebih lanjut yang dilaksanakan oleh Tim *Smart Office* BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perwakilan Nomor Nomor 36/SK/XIX.GOR/08/2023, dengan menambahkan beberapa fitur diantaranya:

- a. *Dashboard Monitoring IKU* dan Realisasi Anggaran
- b. *Dashboard Bezetting* Pegawai Subbag SDM
- c. *Dashboard Klinik* dan Kesehatan
- d. *Dashboard Realisasi Anggaran*
- e. *Dashboard Penghubung ke Aplikasi Inovasi Perwakilan*
 - 1) BukTI (Buku Tamu Digital)
 - 2) Aplikasi GorLIB
 - 3) Klinik Lestari
 - 4) Aplikasi PinjamKDO
 - 5) Aplikasi PinjamRUANG

Optimalisasi Portal membantu BPK Perwakilan dalam mengelola kinerja organisasi, mempermudah dan meningkatkan efisiensi operasional kerja sehingga

mampu mendorong peningkatan produktivitas kinerja organisasi. Bagi pegawai, selain dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja individu juga dapat mempermudah aktivitas kolaborasi. *Stakeholder* pun akan mendapatkan manfaat kemudahan, kecepatan, dan menghemat tenaga dan biaya dalam mendapatkan layanan BPK Perwakilan.

Dari aspek pengelolaan kinerja, Optimalisasi Portal BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. mempermudah para pengambil keputusan atau manajemen termasuk Kepala Perwakilan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi termasuk evaluasi atas pencapaian Indikator Kinerja Triwulanan dan/atau Tahunan;
- b. mengoptimalkan fungsi monitoring kegiatan, realisasi anggaran dan kinerja pegawai/unit kerja/organisasi;
- c. mengurangi aktivitas penatausahaan secara manual sehingga operasional kerja lebih efisien;
- d. menyediakan sarana kerja digital yang lebih mudah digunakan oleh pegawai sehingga dapat menyajikan data yang *real – time* dan akurat;
- e. mempermudah pengelolaan data dan informasi termasuk dalam pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaporan kinerja Triwulanan dan Tahunan;
- f. memudahkan setiap unit kerja untuk melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

6. Optimalisasi Informasi Hukum (JDIH Perwakilan) pada Website BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

JDIH merupakan salah satu *tools* untuk mengatasi kebutuhan yang diperlukan oleh seluruh pegawai di kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait dengan Produk Hukum dan Informasi Hukum. JDIH merupakan jaringan hukum yang terintegrasi sehingga dapat memberikan layanan yang optimal bagi pegawai maupun masyarakat.

Optimalisasi Informasi Hukum berupa JDIH Perwakilan di *website* BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo bertujuan untuk memberikan layanan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui upaya perbaikan dengan mempermudah akses pengelolaan informasi hukum berupa Peraturan Kementerian/Lembaga Negara, Peraturan Pemerintah Daerah, Catatan

Berita, Tulisan Hukum dan Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan BPK Perwakilan Gorontalo melalui Optimalisasi JDIH Perwakilan pada *website* BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Optimalisasi dilakukan dengan mengelompokkan Produk Hukum dengan Informasi Hukum dalam satu media informasi yang diimplementasikan menjadi fitur JDIH Perwakilan dan membuat fitur tersebut menjadi lebih menarik sehingga dapat meningkatkan literasi digital pegawai sekaligus memberikan informasi yang menyenangkan dan informasi yang penting terkait fitur tersebut. Melalui Optimalisasi Informasi Hukum berupa JDIH Perwakilan ini diharapkan dapat mempermudah dan mendukung kelancaran tugas seluruh pegawai kantor perwakilan.

G. PENGHARGAAN

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selama ini telah mendapat beberapa penghargaan baik dari internal maupun eksternal, antara lain:

1. Juara I Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat BPK Tahun 2020, yang diterima pada Oktober 2021;
2. Juara I Tulisan Hukum Tingkat BPK Perwakilan Tahun 2020, yang diterima pada Oktober 2021;
3. Juara III Pengelola *Database* Hukum Tingkat BPK Tahun 2020, yang diterima pada Oktober 2021;
4. Juara III Tulisan Hukum Tingkat BPK Tahun 2021, yang diterima pada Oktober 2022;
5. Unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020, yang diterima pada Desember 2021;
6. Juara II Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat BPK Tahun 2022, yang diterima pada Juni 2023;
7. Juara I Pengelola *Database* Hukum Tingkat BPK Tahun 2022, yang diterima pada Juni 2023;
8. Predikat “Informatif” Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Komisi Informasi Provinsi Gorontalo;
9. Juara I Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat BPK Tahun 2023 yang diterima pada Januari 2024;
10. Juara III Tulisan Hukum Tingkat BPK Tahun 2023, yang diterima pada Juli 2024; dan

11. Juara II Satuan Kerja Pengelola Digitalisasi Pengelolaan Keuangan APBN Terbaik Triwulan II Tahun 2024 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

BAB IV PENUTUP

A. PENCAPAIAN SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN GORONTALO SECARA UMUM

Pada Tahun 2024, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebesar 100,39 di mana skor tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,53 jika dibandingkan dengan pencapaian skor kinerja Tahun 2023 sebelumnya sebesar 98,86.

B. SEBAB-SEBAB UMUM PERUBAHAN CAPAIAN SKOR

Pencapaian skor Tahun 2024 sebagai Tahun Kelima Periode Renstra 2020 – 2024, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan capaian Indikator Kinerja dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini ditandai dengan tercapainya dua belas IKU dan hanya satu IKU yang belum memenuhi target. Adapun penjelasan ringkasnya sebagai berikut.

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan yang capaiannya masih di bawah target yaitu 84,57,% dari 100%. Indikator ini menunjukkan adanya peningkatan dibanding Tahun 2023 yang mencapai 82,86%. Permasalahan yang dihadapi masih sama yaitu adanya catatan dari Direktorat EPP atas hasil LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan perbaikan lebih lanjut di tahun berikutnya dengan cara meningkatkan *QC*, *QA*, dan *cross review* antar pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo serta melaksanakan diskusi dengan tim pemeriksa yang LHP-nya minim koreksi dari Direktorat EPP semester sebelumnya agar kiat-kiat penyusunan LHP dapat saling dibagikan di antara pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan capaiannya mencapai 100% sesuai dengan target sama seperti Tahun sebelumnya. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya untuk menjaga capaian ini melalui upaya peningkatan kualitas *QC* dan *QA*, serta melakukan *cross review* serta diskusi terarah terkait setiap hasil pemeriksaan untuk melihat kesesuaian hasil dengan harapan penugasan.
3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Berdasarkan data IHPS Semester I Tahun 2024, persentase penyelesaian TLRHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai angka 78,13%. Indikator ini menunjukkan adanya peningkatan dibanding Tahun 2023 yang mencapai 72,48%. BPK Perwakilan

- Provinsi Gorontalo pada Tahun 2024 telah melaksanakan berbagai upaya percepatan penyelesaian TLRHP, sehingga capaian kinerja pada Tahun 2024 dapat melebihi target 75%. Kedepannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga akan terus melaksanakan berbagai upaya percepatan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja IKU 3.
4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional capaiannya memenuhi target sama seperti Tahun sebelumnya, di mana Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat mencapai 100,24%. Capaian Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 100,55%. Hal tersebut disebabkan karena alokasi penambahan skor atas pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2024 lebih kecil/rendah dibandingkan Tahun 2023. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 telah berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional terkait Pemeriksaan Kinerja atas Pemeriksaan Kinerja atas Pengendalian Banjir pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Untuk tahun-tahun selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional.
 5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan capaiannya 100,00% mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sama seperti Tahun sebelumnya. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten berupaya untuk memenuhi kontribusi keterlibatan tenaga pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam memenuhi permintaan pemeriksaan yang masuk dari para pemangku kepentingan apabila adanya permohonan dari AUI dan Pusat Kemitraan Global.
 6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal melebihi target, yaitu 101,17% dari target 100,00%. Capaian Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 100,00%. Hal ini tercapai karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2024 telah melaksanakan pemeriksaan tematik lokal perwakilan terkait Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan APBD dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga capaian indikator Kinerja ini dapat memperoleh skor 101,17%.

7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada Tahun 2024 sebesar 4,81 dari target sebesar 4,81. Capaian Tahun 2024 mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 4,79. Peningkatan tersebut disebabkan karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya seperti pengarahan dari Kepala Perwakilan, membentuk tim pengembangan dan internalisasi budaya kerja, dan mensosialisasikan melalui berbagai media, meningkatkan sosialisasi Visi, Misi, dan Nilai Dasar serta Kode Etik BPK dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP capaiannya telah melampaui target sama seperti Tahun sebelumnya, yaitu mendapat nilai 91,40 (AA) dibandingkan dengan target sebesar 90,05 (A). Hal ini dimungkinkan karena penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dilakukan secara tertib serta memperhatikan arahan-arahan dari Itama BPK. Capaian BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memang melampaui target kinerja, namun untuk menjaga capaian tersebut BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus menjaga kualitas pelaporan akuntabilitasnya dengan terus melaksanakan rekomendasi/catatan dari Inspektorat Utama BPK dan menyusun inovasi tingkat perwakilan dalam hal Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan/atau Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, capaiannya adalah 100,00%, yang mana telah melebihi target ditetapkan sebesar 98%. Hal ini dimungkinkan karena pemanfaatan TI dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan telah berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kedepannya, BPK Perwakilan Gorontalo akan terus mengupayakan agar capaian Tahun 2024 yang diperoleh dapat dipertahankan pada tahun berikutnya dengan terus mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun non pemeriksaan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh aplikasi yang dimiliki oleh BPK secara keseluruhan, baik untuk pemeriksaan maupun non pemeriksaan.
10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, capaiannya adalah 102,86% dari target sebesar 100%. Capaiannya Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 101,43%. Hal ini tercapai karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memberikan usulan *best practice* terkait Optimalisasi Informasi Hukum (JDIH Perwakilan) pada *Website* BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan sembilan

aktivitas Manajemen Pengetahuan dari empat jenis aktivitas Manajemen Pengetahuan yang direncanakan. Manajemen Pengetahuan yang telah dilaksanakan adalah Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, dua aktivitas Bantuan Rekan Sejawat, satu aktivitas Reviu Pasca Aktivitas, dan lima aktivitas Forum Transfer Pengetahuan. Ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk menjaga capaian Indikator Kinerja ini dengan terus mengupayakan berbagai inovasi yang dituangkan dalam usulan *best practice* atau replikasi *best practice*, serta melaksanakan manajemen pengetahuan atas seluruh kegiatan yang bermanfaat bagi pemeriksaan maupun non pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, capaiannya adalah 4,30 dan mencapai target yang diharapkan sebesar 3,80. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023 senilai 4,61. Penurunan IKU 11 disebabkan karena kurangnya penyebaran informasi dan monitoring pelaksanaan survei kepada pihak responden eksternal. Hal ini akan terus ditingkatkan lagi pada tahun berikutnya.
12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, capaiannya adalah 100%, yang mana mencapai target yang diharapkan sebesar 100%. Hal ini dimungkinkan karena adanya pelaksanaan pelaksanaan diklat *in-house* berupa diklat pemeriksaan LKPD serta mengoptimalkan diklat-diklat daring dan luring yang semakin mudah diakses oleh setiap pegawai. Untuk ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mendorong pencapaian target kinerja ini dengan tetap melaksanakan diklat *in-house* serta memberikan informasi terkait diklat-diklat daring atau luring baik yang diselenggarakan oleh Internal BPK maupun oleh Institusi Eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja.
13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran, capaiannya melampaui target sama seperti Tahun sebelumnya, yaitu sebesar 91,87% dibandingkan target 84,50%. Capaian Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 89,72%. Kedepannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Subbagian Keuangan akan secara konsisten menjaga kualitas perencanaan dan pemanfaatan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan terus memperhatikan arahan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan serta Unit Kerja lain di BPK yang relevan.

C. KENDALA/HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN IKU TAHUN 2024

Kendala/hambatan dalam pencapaian IKU Tahun 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Tidak tercapainya target IKU 1 terjadi karena masih kurangnya ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan sehingga meskipun telah diupayakan *QA*, *QC*, *cross review* dan diskusi terarah, namun Direktorat EPP masih menemukan catatan-catatan yang harus diperbaiki lagi oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Atas kelemahan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan proses penyusunan secara lebih intens, mengoptimalkan upaya *QA*, *QC*, *cross review* dan diskusi terarah antar pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo serta melaksanakan diskusi dengan tim pemeriksa yang LHP-nya minim koreksi dari Direktorat EPP semester sebelumnya agar kiat-kiat penyusunan LHP dapat saling dibagikan di antara pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo agar LHP yang dihasilkan benar-benar berkualitas.

2. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Meskipun Target IKU 3 tercapai di Tahun 2024, masih terdapat beberapa hambatan/tantangan disebabkan karena:

- a) Komitmen dalam penyelesaian rekomendasi temuan belum sama di seluruh Organisasi Perangkat Daerah/Entitas, antara lain:
 - 1) Majelis TP/TGR tidak berjalan efektif;
 - 2) Penyelesaian TLRHP belum menjadi indikator pengukuran kinerja satker.
- b) Pemahaman Terbatas
 - 1) Substansi temuan dan rekomendasi belum dipahami dengan baik oleh entitas sehingga menyebabkan kesalahpahaman interpretasi rekomendasi.
 - 2) Kurangnya pemahaman terkait kewajiban melaksanakan TLRHP. Pemeriksaan dianggap berakhir saat LHP diserahkan padahal seharusnya setelah rekomendasi selesai ditindaklanjuti.
- c) Perubahan Regulasi
Regulasi yang menjadi kriteria pada temuan sudah dicabut/tidak berlaku.
- d) Subjek PTL Tidak Ada
Subjek PTL meninggal/sakit, perusahaan bubar, bangkrut, dll.

3. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Capaian IKU 11 pada Tahun 2024 adalah 4,30 dari target sebesar 3,80. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023 sebesar 4,61. Penurunan IKU 11 disebabkan karena kurangnya penyebarluasan informasi dan monitoring pelaksanaan survei kepada pihak responden eksternal. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2024 tidak secara berkala memutakhirkan *database* nama-nama personil kunci di entitas pemeriksaan. Kedepannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya mengomunikasikan posisi, tugas dan fungsi BPK terutama BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, serta menjaga kualitas hubungan serta komunikasi tidak hanya dengan entitas yang diperiksa namun juga dengan seluruh *stakeholders* lain di Provinsi Gorontalo, termasuk pihak swasta yang menjadi mitra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo seperti media dan penyedia jasa. Selain itu, pada tahun selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara berkala memutakhirkan *database* personil kunci pemangku kepentingan.

D. STRATEGI DAN RENCANA AKSI DALAM PEMENUHAN TARGET TAHUN 2025

Strategi dan rencana aksi dalam pemenuhan target Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan memperbaiki kualitas penyusunan LHP, termasuk dengan memperketat evaluasi antar tim (*cross review*) serta melaksanakan diskusi dengan tim pemeriksa yang LHP-nya minim koreksi dari Direktorat EPP semester sebelumnya agar kiat-kiat penyusunan LHP dapat saling dibagikan di antara pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan membentuk Tim Reviu dari Sekretariat Perwakilan untuk meningkatkan kualitas LHP.

2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya untuk menjaga capaian ini melalui upaya peningkatan kualitas *QC* dan *QA*, serta melakukan *cross review* serta diskusi terarah terkait setiap hasil pemeriksaan untuk melihat kesesuaian hasil dengan harapan penugasan.

3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mendorong Pemerintah Daerah agar menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan mengoptimalkan upaya-upaya percepatan TLRHP melalui kegiatan:

- a. penyampaian tindak lanjut langsung melalui SiPTL dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiPTL dengan terus mengkomunikasikan dengan Inspektorat Daerah masing-masing entitas;
- b. Membuka kesempatan pemutakhiran tindak lanjut setiap bulan dan menjalin komunikasi intensif setiap triwulan untuk menampung kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut (konsultasi dan bimbingan percepatan TL);
- c. Inventarisasi tindak lanjut yang belum terselesaikan berdasarkan sebaran OPD beserta penyebabnya;
- d. Berkoordinasi dengan Inspektorat selaku koordinator penyelesaian tindak lanjut agar lebih intens dalam melakukan monitoring TLRHP pada setiap OPD;
- e. Menyarankan kepada entitas agar menjadikan penyelesaian tindak lanjut sebagai indikator penilaian kinerja OPD;
- f. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki prosentase tertinggi dalam Penyelesaian Tindak Lanjut dan yang memiliki progres tertinggi Penyelesaian Tindak Lanjut dalam satu tahun; dan
- g. Monitoring atas penyelesaian tindak lanjut dua minggu setelah LHP diserahkan.

4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan seluruh kegiatan pemeriksaan sesuai dengan RKP.

5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten berupaya untuk memenuhi kontribusi keterlibatan tenaga pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam memenuhi permintaan pemeriksaan yang masuk dari para pemangku kepentingan apabila adanya permohonan dari AUI dan Pusat Kemitraan Global.

6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus melaksanakan pemeriksaan tematik lokal sesuai dengan rencana yang dilampirkan dalam periode Renstra mendatang dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan seluruh kegiatan pemeriksaan sesuai dengan RKP.

7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Terus melakukan sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya maupun rapat-rapat yang dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, menginformasikan kepada responden-responden terpilih untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK yang disebarkan setiap Tahun, serta melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa menyelesaikan seluruh survei yang dikirim.

8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus menjaga kualitas pelaporan akuntabilitasnya dengan terus melaksanakan rekomendasi/catatan dari Inspektorat Utama BPK dan mengembangkan upaya inovatif tingkat perwakilan dalam hal Perencanaan Kinerja, Pengukuran, Pelaporan Kinerja dan/atau Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan:

- a. menjaga kualitas laporan dengan menjaga kualitas data dan review berjenjang pada penyusunan laporan; dan
- b. melakukan pemantauan secara periodik atas kinerja sehingga ketercapaian target kinerja terjaga.

9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus mengupayakan untuk memaksimalkan penggunaan seluruh aplikasi BPK oleh seluruh pegawai, melalui kegiatan:

- a) melakukan inventarisasi nama pegawai yang belum melengkapi dan/atau memuktahirkan data dan/atau dokumen di Aplikasi SISDM;
- b) mengisi dan melengkapi SiAP LKPD, DTT, dan Kinerja;
- c) memonitoring dan menindaklanjuti seluruh surat masuk di Aplikasi JASMIN;
- d) menginput data dan/atau dokumen hasil pemeriksaan Semester II pada Aplikasi SMP; dan
- e) memonitoring dan/atau menelaah setiap dokumen tindak lanjut yang telah diinput dalam Aplikasi SiPTL.

10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menjaga capaian Indikator Kinerja ini dengan terus mengupayakan berbagai inovasi yang dituangkan dalam usulan *best practice* atau replikasi *best practice*, serta melaksanakan manajemen

pengetahuan atas seluruh kegiatan yang bermanfaat bagi pemeriksaan maupun non pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan kegiatan:

- a. mengidentifikasi kegiatan yang dapat dijadikan sebagai bahan *best practice* atau replikasi; dan
- b. membuat kalender umum kegiatan manajemen pengetahuan tahunan yang berisi kegiatan-kegiatan manajemen pengetahuan yang bisa dilaksanakan.

11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

- a. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya mengomunikasikan posisi, tugas dan fungsi BPK, serta menjaga kualitas hubungan dan komunikasi tidak hanya dengan entitas yang diperiksa namun juga dengan seluruh *stakeholders* lain di Provinsi Gorontalo termasuk pihak swasta yang menjadi mitra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo seperti media dan penyedia jasa.
- b. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara berkala memutakhirkan *database* personil kunci pemangku kepentingan.
- c. Meningkatkan komunikasi dengan pihak Direktorat PSMK untuk memastikan bahwa seluruh pegawai penerima survei via *e-mail* telah melaksanakan kewajibannya mengisi kuesioner implementasi nilai dasar BPK.

12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mendorong pencapaian target kinerja ini dengan tetap melaksanakan diklat *in-house* serta memberikan informasi terkait diklat-diklat daring dan luring baik yang diselenggarakan oleh Internal BPK maupun oleh Institusi Eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja.

13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Subbagian Keuangan akan secara konsisten menjaga kualitas pemanfaatan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan terus memperhatikan arahan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan serta Unit Kerja lain di BPK yang relevan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan kegiatan:

- a) berkoordinasi dengan Biro Keuangan BPK permasalahan terkait rencana output BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya diatur dalam SBKK/SBKU;
- b) memaksimalkan pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi;

- c) melaksanakan penajaman kegiatan prioritas, efisiensi, dan optimalisasi terhadap pagu anggaran yang ada pada DIPA/POK Satker;
- d) memonitoring dan memastikan pencapaian target Rencana Output (RO) melalui Subbagian Keuangan; dan
- e) melaksanakan koordinasi secara berkala antara Subbagian Keuangan dengan unit kerja lainnya terkait dengan permasalahan dan/atau kendala dalam rangka penyelesaian target RO.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

LAMPIRAN

1

LAMPIRAN 1



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Laode Nusriadi, S.E., M.Si., CA., Ak., CSFA., CFA., ACPA., FCPA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2024. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

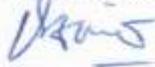


INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp18.250.010.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp5.978.410.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp12.271.600.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)
		8 Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)
		9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
		10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13 Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%

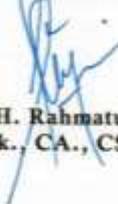
Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,



Laode Nusriadi, S.E., M.Si., CA., Ak., CSFA., CFA., ACPA., FCPA.

Pihak Pertama,



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA., CSFA.

LAMPIRAN

2

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 004
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO 890639

Tgl Data : 15/01/25 12:52 AM
Tgl Cetak : 15/01/25 9:35 AM
Halaman : 2
lap_tra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	18,078,290,000	17,898,794,654	(179,495,346)	99	16,737,520,000	16,693,869,032	43,650,968	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

GORONTALO, 15 Januari 2025
Peranggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNAN ANGGARAN

BORDY AGUS MULYO
NIP. 197908302002121004

LAMPIRAN

3

LAMPIRAN 3

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	0%	40%	40%	100%	Desember 2024	<p>Januari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan kegiatan Pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control (QC)</i> Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance (QA)</i> yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP); <p>Februari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control (QC)</i> Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance (QA)</i> yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP); Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan melalui lapming dan/atau diskusi mingguan; Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan; Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik; dan Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP dalam pemeriksaan interim LKPD. <p>Maret 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pemeriksaan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan melalui lapming dan/atau diskusi mingguan; • Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan; • Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik; dan • Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP dalam pemeriksaan interim LKPD serta PDTT Banparpol. <p>April 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan melalui lapming dan/atau diskusi mingguan; • Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan; • Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik; • Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP dalam Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2022 serta PDTT Banparpol. <p>Mei 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan melalui lapming dan/atau diskusi mingguan; • Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan; • Melaksanakan <i>cross</i> reuiu antar Tim Pemeriksaan atas LHP 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>LKPD;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP dalam Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2022. <p>Juni 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan Pemeriksaan Terinci LKPD atas 7 (tujuh) entitas; dan • Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP dalam Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2022. <p>Juli 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP); <p>Agustus 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP); <p>September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP); • Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap pengurusan melalui lapming dan/atau diskusi mingguan; • Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan; dan 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<ul style="list-style-type: none"> Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik. 	
							<p>Oktober 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP); 	
							<p>November 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP); Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan melalui lapming dan/atau diskusi mingguan; Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan; dan Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik. 	
							<p>Desember 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan melalui lapming dan/atau diskusi mingguan; Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan; Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik; 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan <i>cross</i> reviu antar Tim pemeriksaan atas LHP Semester II; dan Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Semester II. 	
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2024 <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Program Pemeriksaan (P2) Interim LKPD TA 2023 Januari 2024 <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Interim LKPD TA 2023 pada tujuh entitas dengan memedomani P2. Februari 2024 <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Program Pemeriksaan (P2) Terinci LKPD TA 2023. Maret 2024 <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2022 pada tujuh entitas dengan memedomani P2. April 2024 <ul style="list-style-type: none"> Menyusun LHP LKPD TA 2023 pada tujuh entitas. Mei 2024 <ul style="list-style-type: none"> Menyerahkan tujuh LHP LKPD TA 2023 ke Direktorat EPP untuk dievaluasi sebagai bukti capaian kinerja. Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2024 Juni 2024 <ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2024. Juli 2024 <ul style="list-style-type: none"> Menyusun P2 Pemeriksaan Semester II; dan Melaksanakan Pemeriksaan Semester II dengan memedomani P2. Agustus 2024 <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Semester II dengan memedomani P2. September 2024 <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Semester II dengan memedomani P2. Oktober 2024 <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Semester II dengan memedomani P2. 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							November 2024 <ul style="list-style-type: none"> Menyusun LHP Pemeriksaan Semester II Desember 2024 <ul style="list-style-type: none"> Menyusun LHP Pemeriksaan Semester II; dan Menyerahkan LHP Pemeriksaan Semester II ke Direktorat EPP untuk dievaluasi sebagai bukti capaian kinerja. 	
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember 2024 Januari 2024 <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL; Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I. Februari 2024 <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak berwenang pada Kantor Pusat BPK dalam rangka percepatan validasi dokumen TL pada SIPTL; Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL; Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I. Maret 2024 <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL; Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I. 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>April 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL; Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I. <p>Mei 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL; Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I. <p>Juni 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL; Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I. <p>Juli 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak berwenang pada Kantor Pusat BPK dalam rangka percepatan validasi dokumen TL pada SIPTL; Pelaksanaan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester I dengan mengundang entitas untuk mempercepat pelaksanaan TL dengan melaksanakan pembahasan dan verifikasi dokumen TLRHP; Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL; 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan persentase TL melalui SIPTL; dan • Pemberian Penghargaan kepada Entitas dengan Persentase TL Tertinggi dan Progress TL Tertinggi. 	
							<p>Agustus 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL; • Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan • Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II. 	
							<p>September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL; • Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan • Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II. 	
							<p>Oktober 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL; • Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan • Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II. 	
							<p>November 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL; • Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan • Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II. 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II.</p> <p>Desember 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II dengan mengundang entitas untuk mempercepat pelaksanaan TL dengan melaksanakan pembahasan dan verifikasi dokumen TLRHP; • Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL; • Pemberian Penghargaan kepada Entitas dengan Persentase TL Tertinggi dan Progress TL Tertinggi; dan • Pemantauan persentase TL melalui SIPTL. 	
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0%	0%	0%	100%	<p>Desember 2024</p> <p>Januari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK. <p>Februari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK. <p>Maret 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK. • Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK. <p>April 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK. <p>Mei 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK. <p>Juni 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional; • Melakukan perubahan atas RKP apabila terdapat penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan tema pemeriksaan tematik nasional; dan 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kajian dan KAK Pemeriksaan sesuai dengan <i>strategic paper</i> pemeriksaan. 	
							<p>Juli 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kajian dan KAK Pemeriksaan sesuai dengan <i>strategic paper</i> pemeriksaan. 	
							<p>Agustus 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pemeriksaan interim tematik nasional. 	
							<p>September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pemeriksaan interim tematik nasional. Penyusunan LHPP pemeriksaan interim tematik nasional. 	
							<p>Oktober 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pemeriksaan terinci tematik nasional. 	
							<p>November 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pemeriksaan terinci tematik nasional. 	
							<p>Desember 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Penerbitan LHP atas pemeriksaan terinci tematik nasional. 	
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Desember 2024</p> <p>Januari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>Februari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>Maret 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>April 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>Mei 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>Juni 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>Juli 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>Agustus 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan • Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan • Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>Oktober 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan • Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>November 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan • Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>Desember 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan • Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2024	<p>Januari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal. Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's. <p>Februari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal. Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's. <p>Maret 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal. Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's. <p>April 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal. Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's. <p>Mei 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal. Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's. <p>Juni 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan) (9)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>lokal;</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's; dan Melakukan perubahan atas RKP apabila terdapat penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan tema pemeriksaan tematik lokal. <p>Juli 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan pemeriksaan atas topik yang akan dijadikan tematik lokal dengan memperhatikan ketersediaan pemeriksa. <p>Agustus 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan interim tematik lokal. <p>September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun LHPP tematik lokal. <p>Oktober 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan terinci tematik lokal. <p>November 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan LHP tematik lokal. <p>Desember 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan LHP tematik lokal. 	
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)	-	-	-	Sangat Memuaskan (4,81)	Desember 2024	<p>Januari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan. Pengarahan Kepala Perwakilan dan Edukasi penguatan Integritas bekerja sama dengan Itama Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut-turut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>Februari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP. Komunikasi Audit dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung penegakan IIP oleh Pegawai BPK <p>Maret 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; dan Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP. <p>April 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan. Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD. <p>Mei 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; dan Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP. <p>Juni 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan. <p>Juli 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP. <p>Agustus 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan. <p>September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; dan • Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP. <p>Oktober 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan. <p>November 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; dan • Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP. <p>Desember 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan. 	
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (90,05)	-	-	-	A (90,05)	<p>Desember 2024</p> <p>Januari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024; • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP/RKSP; • Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>Anggaran PRISMA tepat waktu;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; dan • Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU. 	
							<p>Februari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantaun kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP/RKSP; • Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Anggaran PRISMA tepat waktu; • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; • Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU. 	
							<p>Maret 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantaun kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP/RKSP; • Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Anggaran PRISMA tepat waktu; • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; • Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU. 	
							<p>April 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantaun kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP/RKSP;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dan layanan bidang keuangan setiap triwulan agar dapat memastikan peningkatan kinerja dan perbaikan yang berkelanjutan. • Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Anggaran PRISMA tepat waktu; • Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2024 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi; • Penyusunan Laporan Kinerja mengacu Keputusan Sekjen dan ketentuan terkait lainnya; • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; dan • Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU. <p>Mei 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP/RKSP; • Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Anggaran PRISMA tepat waktu; • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; • Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU. <p>Juni 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP/RKSP; • Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Anggaran PRISMA tepat waktu; 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; • Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU. 	
							<p>Juli 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP/RKSP; • Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dan layanan bidang keuangan setiap triwulan agar dapat memastikan peningkatan kinerja dan perbaikan yang berkelanjutan. • Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Anggaran PRISMA tepat waktu; • Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II 2024 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi; • Penyusunan Laporan Kinerja mengacu Keputusan Sekjen dan ketentuan terkait lainnya; • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; dan • Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU. 	
							<p>Agustus 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP/RKSP; • Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Anggaran PRISMA tepat waktu; • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; • Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU.</p> <p>September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP/RKSP; • Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Anggaran PRISMA tepat waktu; • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; • Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU. <p>Oktober 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP/RKSP; • Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dan layanan bidang keuangan setiap triwulan agar dapat memastikan peningkatan kinerja dan perbaikan yang berkelanjutan. • Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Anggaran PRISMA tepat waktu; • Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III 2024 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi; • Penyusunan Laporan Kinerja mengacu Keputusan Sekjen dan ketentuan terkait lainnya; • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; dan • Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU. 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>November 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP/RKSP; Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Anggaran PRISMA tepat waktu; Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU; dan Evaluasi Mandiri atas Pengelolaan Kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. <p>Desember 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dan layanan bidang keuangan setiap triwulan agar dapat memastikan peningkatan kinerja dan perbaikan yang berkelanjutan. Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Anggaran PRISMA tepat waktu; Koordinasi dengan Itama BPK atas Hasil Evaluasi Mandiri atas Pengelolaan Kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; Penyusunan Laporan Kinerja mengacu Keputusan Sekjen dan ketentuan terkait lainnya. 	
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	28%	65%	75%	98%	<p>Desember 2024</p> <p>Januari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; Pimpinan mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan; dan • Mengaktifkan notifikasi email BPK kedalam gawai (Android dan/atau Iphone), apabila ada surat masuk via Jasmin akan ada notifikasi di gawai pegawai. <p>Februari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; • Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM; • Mengaktifkan notifikasi email BPK kedalam gawai (Android dan/atau Iphone), apabila ada surat masuk via Jasmin akan ada notifikasi di gawai pegawai; dan • Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan. <p>Maret 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM; • Mengaktifkan notifikasi email BPK kedalam gawai (Android dan/atau Iphone), apabila ada surat masuk via Jasmin akan ada notifikasi di gawai pegawai; • Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan; dan • Agenda manajemen secara periodik untuk memonitoring, mengingatkan, menginput dan menindaklanjuti aplikasi SISDM, JASMIN, SMP, SIAP dan SiPTL untuk memastikan bahwa pemanfaatan TI di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah terlaksana dengan optimal pada Triwulan I: 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>a. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemutakhiran Riwayat LHKPN 2) Pemutakhiran Riwayat Tempat Tinggal/Domisili 3) Pemutakhiran Riwayat Pendidikan Dinas 4) Pemutakhiran Riwayat SPT 5) Pemutakhiran Riwayat Seminar/Workshop/Sosialisasi/sejenis 6) Pemutakhiran Riwayat SPT <p>b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengingatkan Log akses Aplikasi JASMIN pada pejabat Struktural; dan 2) Mengingatkan tindaklanjut disposisi/arsip atas surat masuk Aplikasi JASMIN. <p>c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengingatkan LHP Terinci yang diinput ke SMP 2) Mengingatkan Softcopy LHP Terinci yang diunggah ke SMP. <p>d. Tingkat pemanfaatan aplikasi SiAP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat penyelesaian Hasil Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan (HP3) setiap tim SIAP; dan 2) Pemanfaatan SIAP untuk seluruh RKP Laporan Keuangan, Kinerja, dan (DTT). <p>e. Tingkat pemanfaatan aplikasi SiPTL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah Bahan TL yang memiliki status read X 100%; dan 2) Jumlah Bahan TL yang dikirimkan oleh entitas. <p>April 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Biro TI BPK dalam rangka evaluasi pemanfaatan Layanan TI BPK; • Mengaktifkan notifikasi email BPK kedalam gawai (Android dan/atau Iphone), apabila ada surat masuk via Jasmin akan ada notifikasi di gawai pegawai; • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM.</p> <p>Mei 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; • Mengaktifkan notifikasi email BPK kedalam gawai (Android dan/atau Iphone), apabila ada surat masuk via Jasmin akan ada notifikasi di gawai pegawai; dan • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM. <p>Juni 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; • Mengaktifkan notifikasi email BPK kedalam gawai (Android dan/atau Iphone), apabila ada surat masuk via Jasmin akan ada notifikasi di gawai pegawai; • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM; dan • Agenda manajemen secara periodik untuk memonitoring, mengingatkan, menginput dan menindaklanjuti aplikasi SISDM, JASMIN, SMP, SIAP dan SiPTL untuk memastikan bahwa pemanfaatan TI di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah terlaksana dengan optimal pada Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemutakhiran Riwayat LHKPN 2) Pemutakhiran Riwayat Tempat Tinggal/Domisili 3) Pemutakhiran Riwayat Pendidikan Dinas 4) Pemutakhiran Riwayat SPT 5) Pemutakhiran Riwayat 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							Seminar/Workshop/Sosialisasi/sejenis 6) Pemutakhiran Riwayat SPT b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN 1) Mengingatkan Log akses Aplikasi JASMIN pada pejabat Struktural; dan 2) Mengingatkan tindaklanjut disposisi/arsip atas surat masuk Aplikasi JASMIN. c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP 1) Mengingatkan LHP Terinci yang diinput ke SMP 2) Mengingatkan Softcopy LHP Terinci yang diunggah ke SMP. d. Tingkat pemanfaatan aplikasi SiAP 1) Tingkat penyelesaian Hasil Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan (HP3) setiap tim SIAP; dan 2) Pemanfaatan SIAP untuk seluruh RKP Laporan Keuangan, Kinerja, dan (DTT). e. Tingkat pemanfaatan aplikasi SiPTL 1) Jumlah Bahan TL yang memiliki status read X 100%; dan 2) Jumlah Bahan TL yang dikirimkan oleh entitas.	
							Juli 2024 <ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; • Mengaktifkan notifikasi email BPK kedalam gawai (Android dan/atau Iphone), apabila ada surat masuk via Jasmin akan ada notifikasi di gawai pegawai; dan • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM. 	
							Agustus 2024 <ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan) (9)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengaktifkan notifikasi email BPK kedalam gawai (Android dan/atau Iphone), apabila ada surat masuk via Jasmin akan ada notifikasi di gawai pegawai. <p>September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM; • Mengaktifkan notifikasi email BPK kedalam gawai (Android dan/atau Iphone), apabila ada surat masuk via Jasmin akan ada notifikasi di gawai pegawai; dan • Agenda manajemen secara periodik untuk memonitoring, mengingatkan, menginput dan menindaklanjuti aplikasi SISDM, JASMIN, SMP, SIAP dan SiPTL untuk memastikan bahwa pemanfaatan TI di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah terlaksana dengan optimal pada Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemutakhiran Riwayat LHKPN 2) Pemutakhiran Riwayat Tempat Tinggal/Domisili 3) Pemutakhiran Riwayat Pendidikan Dinas 4) Pemutakhiran Riwayat SPT 5) Pemutakhiran Riwayat Seminar/Workshop/Sosialisasi/sejenis 6) Pemutakhiran Riwayat SPT b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN <ul style="list-style-type: none"> 1) Mengingatkan Log akses Aplikasi JASMIN pada pejabat Struktural; dan 2) Mengingatkan tindaklanjut disposisi/arsip atas surat masuk Aplikasi JASMIN. c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP <ul style="list-style-type: none"> 1) Mengingatkan LHP Terinci yang diinput ke SMP 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>2) Mengingatkan Softcopy LHP Terinci yang diunggah ke SMP.</p> <p>d. Tingkat pemanfaatan aplikasi SiAP</p> <p>1) Tingkat penyelesaian Hasil Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan (HP3) setiap tim SIAP; dan</p> <p>2) Pemanfaatan SIAP untuk seluruh RKP Laporan Keuangan, Kinerja, dan (DTT).</p> <p>e. Tingkat pemanfaatan aplikasi SiPTL</p> <p>1) Jumlah Bahan TL yang memiliki status read X 100%; dan</p> <p>2) Jumlah Bahan TL yang dikirimkan oleh entitas.</p> <p>Oktober 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Biro TI BPK dalam rangka evaluasi pemanfaatan Layanan TI BPK; • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK dan Kinerja/DTT, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; • Mengaktifkan notifikasi email BPK kedalam gawai (Android dan/atau Iphone), apabila ada surat masuk via Jasmin akan ada notifikasi di gawai pegawai; dan • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM. <p>November 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK dan Kinerja/DTT, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM; • Mengaktifkan notifikasi email BPK kedalam gawai (Android dan/atau Iphone), apabila ada surat masuk via Jasmin akan 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan) (9)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>ada notifikasi di gawai pegawai.</p> <p>Desember 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; • Mengaktifkan notifikasi email BPK kedalam gawai (Android dan/atau Iphone), apabila ada surat masuk via Jasmin akan ada notifikasi di gawai pegawai; • Pemimpin mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM; dan • Agenda manajemen secara periodik untuk memonitoring, mengingatkan, menginput dan menindaklanjuti aplikasi SISDM, JASMIN, SMP, SIAP LKPD dan Kinerja/DTT dan SiPTL untuk memastikan bahwa pemanfaatan TI di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah terlaksana dengan optimal pada Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemutakhiran Riwayat LHKPN 2) Pemutakhiran Riwayat Tempat Tinggal/Domisili 3) Pemutakhiran Riwayat Pendidikan Dinas 4) Pemutakhiran Riwayat SPT 5) Pemutakhiran Riwayat Seminar/Workshop/Sosialisasi/sejenis 6) Pemutakhiran Riwayat SPT b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN <ul style="list-style-type: none"> 1) Mengingatn Log akses Aplikasi JASMIN pada pejabat Struktural; dan 2) Mengingatn tindaklanjut disposisi/arsip atas surat masuk Aplikasi JASMIN. c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP <ul style="list-style-type: none"> 1) Mengingatn LHP Terinci yang diinput ke SMP 2) Mengingatn Softcopy LHP Terinci yang diunggah ke SMP. d. Tingkat pemanfaatan aplikasi SiAP 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							1) Tingkat penyelesaian Hasil Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan (HP3) setiap tim SIAP; dan 2) Pemanfaatan SIAP untuk seluruh RKP Laporan Keuangan, Kinerja, dan (DTT). e. Tingkat pemanfaatan aplikasi SiPTL 1) Jumlah Bahan TL yang memiliki status read X 100%; dan 2) Jumlah Bahan TL yang dikirimkan oleh entitas.	
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%	37,50%	50%	100%	Desember 2024 Januari 2024 <ul style="list-style-type: none"> Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> untuk Tahun 2024 di lingkungan Perwakilan; Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan LKPD TA 2024; dan Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan Forum Transfer Pengetahuan (Edukasi Penguatan Integritas). Mendorong budaya inovasi di setiap unit kerja dalam setiap rapat koordinasi Februari 2024 <ul style="list-style-type: none"> Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> untuk Tahun 2024 di lingkungan Perwakilan. Mendorong budaya inovasi di setiap unit kerja dalam setiap rapat koordinasi Maret 2024 <ul style="list-style-type: none"> Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> untuk Tahun 2024 di lingkungan Perwakilan dan mempelajari <i>Best Practice</i> di lingkungan BPK untuk mendorong udaya inovasi di Perwakilan April 2024 <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi rencana implementasi <i>best practice</i> / replikasi <i>best practice</i> di perwakilan Monitoring dan evaluasi implementasi manajemen pengetahuan di perwakilan. Mei 2024 <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait Reviu Pasca Aktivitas. 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait Bantuan Rekan Sejawat.
								<p>Juni 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi implementasi <i>best practice</i> / replikasi <i>best practice</i> di perwakilan. Monitoring dan evaluasi implementasi manajemen pengetahuan di perwakilan.
								<p>Juli 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi implementasi <i>best practice</i> / replikasi <i>best practice</i> di perwakilan.
								<p>Agustus 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi implementasi <i>best practice</i> / replikasi <i>best practice</i> di perwakilan.
								<p>September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi implementasi <i>best practice</i> / replikasi <i>best practice</i> di perwakilan; Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait Mentoring Diklat Pembentukan JFP. Monitoring dan evaluasi implementasi manajemen pengetahuan di perwakilan
								<p>Oktober 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi implementasi <i>best practice</i> / replikasi <i>best practice</i> di perwakilan;
								<p>November 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi implementasi <i>best practice</i> / replikasi <i>best practice</i> di perwakilan;
								<p>Desember 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun serta menyampaikan usulan <i>Best Practice</i>/penerapan <i>Best Practice</i> kepada Ditama Revbang. Untuk usulan <i>Best Practice</i> yang telah divalidasi dan disahkan, dapat diterapkan implementasinya, serta dilakukan <i>sharing knowledge</i> pada pihak lain.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember 2024	<p>Januari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
	Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi						<p>Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.</p> <p>Februari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan LKPD untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan; dan Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK, pengelolaan <i>website</i> dan media sosial di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan. <p>Maret 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan LKPD untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan; dan Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK, pengelolaan <i>website</i> dan media sosial di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan. <p>April 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan kuesioner kepuasan kepada pemangku kepentingan yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut; dan Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK, pengelolaan <i>website</i> dan media sosial di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan. <p>Mei 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan. <p>Juni 2024</p> <p>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK, pengelolaan <i>website</i> dan media sosial di bawah koordinasi</p>	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan) (9)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							Subbagian Humas dan TU Kalan.	
							<p>Juli 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK, pengelolaan <i>website</i> dan media sosial di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan. 	
							<p>Agustus 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan Kinerja dan/atau PDTT untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan; dan Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK, pengelolaan <i>website</i> dan media sosial di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan. 	
							<p>September 2024</p> <p>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK, pengelolaan <i>website</i> dan media sosial di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.</p>	
							<p>Oktober 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan kuesioner <i>kepuasan</i> kepada pemangku kepentingan yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut; dan Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK, pengelolaan <i>website</i> dan media sosial di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.. 	
							<p>November 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan Kinerja dan/atau PDTT untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan; dan Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK, 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)	
(1)	(2)		TW I			TW II			TW III			TW IV					(8)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)	
																Desember 2024	<p>pengelolaan <i>website</i> dan media sosial di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan..</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK, pengelolaan <i>website</i> dan media sosial di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan..
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	5%	10%	15%	20%	25%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Desember 2024	<p>Januari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai; Melaksanakan diklat persiapan LKPD TA 2023 di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan. <p>Februari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Februari bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang; Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring/<i>self learning</i> dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan. <p>Maret 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Maret bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang; Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring/<i>self learning</i> dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan. <p>April 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan April bagi 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I		TW II		TW III		TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)
												<p>pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang; • Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring/<i>self learning</i> dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.
												<p>Mei 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Mei bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang; • Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring/<i>self learning</i> dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.
												<p>Juni 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Juni bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang; • Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring/<i>self learning</i> dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.
												<p>Juli 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Juli bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang; • Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring/<i>self learning</i> dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.
												<p>Agustus 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Agustus bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang; • Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring/<i>self learning</i>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja						Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan)		
(1)	(2)		TW I		TW II		TW III				TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)
												<p>dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</p> <p>September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan September bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang; • Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring/<i>self learning</i> dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan. <p>Oktober 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Oktober bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang; • Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring/<i>self learning</i> dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan. <p>November 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan November bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang; • Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring/<i>self learning</i> dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan. <p>Desember 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Desember bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang; • Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring/<i>self learning</i> dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.
IKU 13	Tingkat Kinerja	84,50%	84,50%		84,50%		84,50%		84,50%		Desember 2024	Januari 2024

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
	Anggaran						<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi terkait kebijakan pengelolaan anggaran TA 2024; Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP /RKSP; Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan deviasi realisasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas aktivitas pelaksanaan anggaran yang menjadi indikator penilaian IKPA. Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi; dan Menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Output secara berkala dan tepat waktu. 	
							<p>Februari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen penganggaran dan revisi anggaran; Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP /RKSP; Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan deviasi realisasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas aktivitas pelaksanaan anggaran yang menjadi indikator penilaian IKPA. Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi; dan Menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Output secara berkala dan tepat waktu. 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>Maret 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dokumen penganggaran dan revisi anggaran; • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP /RKSP; • Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; • Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan deviasi realisasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA. • Melakukan pengawasan dan pengendalian atas aktivitas pelaksanaan anggaran yang menjadi indikator penilaian IKPA. • Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi; dan • Menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Output secara berkala dan tepat waktu. <p>April 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dokumen penganggaran dan revisi anggaran; • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP /RKSP; • Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; • Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan deviasi realisasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA; • Melakukan pengawasan dan pengendalian atas aktivitas pelaksanaan anggaran yang menjadi indikator penilaian IKPA; • Melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran setiap Triwulan, serta menyusun langkah antisipasi dan perbaikan untuk diterapkan pada Triwulan berikutnya. • Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Output secara berkala dan tepat waktu. 	
							<p>Mei 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen penganggaran dan revisi anggaran; Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP /RKSP; Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan deviasi realisasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas aktivitas pelaksanaan anggaran yang menjadi indikator penilaian IKPA. Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi; dan Menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Output secara berkala dan tepat waktu. 	
							<p>Juni 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen penganggaran dan revisi anggaran; Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP /RKSP; Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan deviasi realisasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas aktivitas pelaksanaan anggaran yang menjadi indikator penilaian 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>IKPA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi; dan Menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Output secara berkala dan tepat waktu. <p>Juli 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen penganggaran dan revisi anggaran; Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP /RKSP; Melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran setiap Triwulan, serta menyusun langkah antisipasi dan perbaikan untuk diterapkan pada Triwulan berikutnya; Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan deviasi realisasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas aktivitas pelaksanaan anggaran yang menjadi indikator penilaian IKPA. Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi; dan Menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Output secara berkala dan tepat waktu. <p>Agustus 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen penganggaran dan revisi anggaran; Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP /RKSP; Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan deviasi realisasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA. • Melakukan pengawasan dan pengendalian atas aktivitas pelaksanaan anggaran yang menjadi indikator penilaian IKPA. • Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi; dan • Menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Output secara berkala dan tepat waktu. 	
							<p>September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dokumen penganggaran dan revisi anggaran; • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP /RKSP; • Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; • Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan deviasi realisasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA. • Melakukan pengawasan dan pengendalian atas aktivitas pelaksanaan anggaran yang menjadi indikator penilaian IKPA. • Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi; dan <p>Menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Output secara berkala dan tepat waktu.</p>	
							<p>Oktober 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dokumen penganggaran dan revisi anggaran; • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP /RKSP;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran setiap Triwulan, serta menyusun langkah antisipasi dan perbaikan untuk diterapkan pada Triwulan berikutnya; • Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; • Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan deviasi realisasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA. • Melakukan pengawasan dan pengendalian atas aktivitas pelaksanaan anggaran yang menjadi indikator penilaian IKPA. • Menyusun Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan.. • Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi; dan • Menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Output secara berkala dan tepat waktu. 	
							<p>November 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dokumen penganggaran dan revisi anggaran; • Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP /RKSP; • Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; • Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan deviasi realisasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA. • Melakukan pengawasan dan pengendalian atas aktivitas pelaksanaan anggaran yang menjadi indikator penilaian IKPA. • Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi; dan 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Output secara berkala dan tepat waktu. 	
							<p>Desember 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen penganggaran dan revisi anggaran; Menyusun rencana aksi kegiatan penganggaran, pemantauan kinerja anggaran, dan layanan perbendaharaan untuk mendukung upaya antisipatif dalam pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan RKP /RKSP; Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan deviasi realisasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA; Melakukan pengawasan dan pengendalian atas aktivitas pelaksanaan anggaran yang menjadi indikator penilaian IKPA; Melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran setiap Triwulan, serta menyusun langkah antisipasi dan perbaikan untuk diterapkan pada Triwulan berikutnya. Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi; dan Menyusun dan menyampaikan Laporan Capaian Output secara berkala dan tepat waktu. 	

